

**ANALISIS KONTRIBUSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
Studi Kasus di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2005 – 2009**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



**Oleh:
Roberta Kristina Sulistyawati
NIM : 062114052**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
2010**

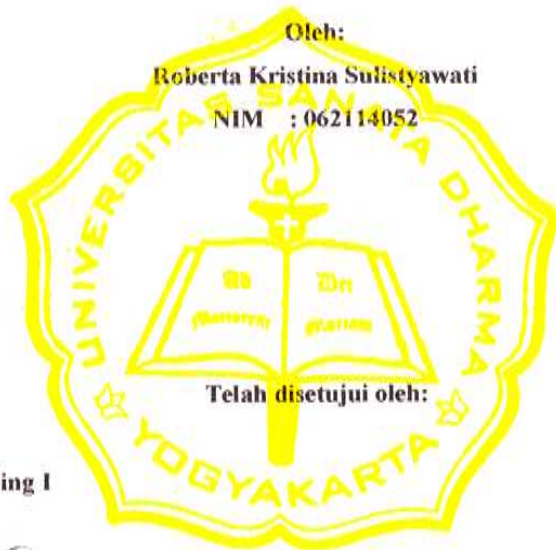
Skripsi

**ANALISIS KONTRIBUSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
Studi Kasus di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2005 – 2009**

Oleh:

Roberta Kristina Sulistyawati

NIM : 062114052



Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA

Tanggal: 18 Mei 2010

Skripsi

**ANALISIS KONTRIBUSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
Studi Kasus di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2005 – 2009**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:
Roberta Kristina Sulistyawati
NIM : 062114052

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 29 Juni 2010
dan dinyatakan memenuhi syarat

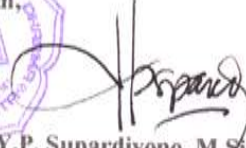
Susunan Dewan Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt	
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt, QIA	
Anggota	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA	
Anggota	A. Diksa Kuntara, S.E., MFA., QIA	
Anggota	Josephine Wuri, S.E., M.Si	

Yogyakarta, 30 Juni 2010

Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan,




Drs. Y.P. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk:

- Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang telah memberkati dan mencurahkan rahmat-Nya dalam hidupku.
 - Santa Roberta Belarmina yang menjagaku.
- Mama Papa yang selalu mendukungku lewat doa dan perbuatan.
 - Florentinus Agung Wijayatmo yang tak henti-hentinya memberi warna lain dalam hidupku.
 - Untuk teman-teman yang mendukungku, membantuku.
- Untuk masa depanku, ke mana arah hidupku nantinya..., semoga aku bisa menjadi 'orang' dan dapat dibanggakan keluarga.



**UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: ANALISIS KONTRIBUSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH Studi Kasus di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 29 Juni 2010 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 16 Juli 2010
Penulis

Roberta Kristina Sulistyawati

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Roberta Kristina Sulistyawati

Nomor mahasiswa : 062114052

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: ANALISIS KONTRIBUSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH Studi Kasus di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hal untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 16 Juli 2010

Yang menyatakan



ROBERTA KRISTINA SULISTYAWATI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kontribusi, Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Studi Kasus di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Y.P. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
2. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA selaku Kaprodi Jurusan Akuntansi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
3. Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA, selaku dosen Pembimbing yang telah berkenan memberi bimbingan, pengarahan, dan nasihat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu kepada penulis, serta seluruh karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah melayani semua kebutuhan akademis selama duduk di bangku perkuliahan.

5. Keluarga besar Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: Pak Dody, Pak Widiyanto, Pak Nugri dan Pak Ari yang telah membantu dan mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian.
6. Pak Aris Dwiatmoko dan Pak Wid LKD: terima kasih Pak atas bantuannya.
7. Mama, Papa tercinta: yang senantiasa setia mendampingi aku di masa sulitku. Selalu mendukungku dengan doa, hiburan serta masakan yang nikmat dan bergizi. Selalu mengantar aku, membantu aku saat hadapi masalah. Cinta kalian sungguh berlimpah dalam hidupku.
8. Florentinus Agung Wijayatmo: atas kasih sayang dan cintamu yang selalu setia mendengarkan keluh kesahku, serta tak pernah bosan mengingatkanku untuk terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Adhis: terima kasih bantuan dan semangat yang diberikan, hingga aku bisa selesai menyusun skripsi ini.
10. Gidul dan Tessy: terima kasih selalu buat aku ketawa disaat aku patah semangat dan butuh penghiburan..
11. Teman-temanku: Wulan, Funny, Uun, Rini, Irene: terima kasih telah mau membimbing, memberi semangat dan menghiburku saat aku sedih, aku bangga punya teman seperti kalian.
12. Teman-teman seperjuangan MPT dan KKP: Ika, Eren, Fancil, Mas Diktus, Pranti, Irene, Shinta, Mas Edi, Mas Singgih terima kasih sudah mau membantuku, ayo semangat teman!

13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari karena adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, skripsi ini masih jauh dari sempurna. Maka, segala kritik maupun saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 21 Juli 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
HALAMAN DAFTAR TABEL	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II: LANDASAN TEORI	7
A. Dasar-dasar Perpajakan	7
1. Pengertian Pajak	7
2. Ciri-ciri Pajak	8
3. Fungsi Pajak	9
4. Teori Pemungutan Pajak	9
5. Hukum Pajak	10
6. Tata Cara Pemungutan Pajak	11
7. Hambatan Pemungutan Pajak	14
8. Pengelompokan Pajak	15
9. Macam Tarif Pajak	16

B. Pajak Kendaraan Bermotor	17
1. Pengertian Kendaraan Bermotor	17
2. Pengertian Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ...	17
3. Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor	18
4. Dasar Pengenaan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	18
5. Penetapan Besarnya Pajak Kendaraan Bermotor	19
6. Pengecualian Objek Pajak Kendaraan Bermotor	19
C. Pendapatan Daerah	20
1. Pendapatan Asli Daerah	20
2. Dana Perimbangan	21
3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	21
D. Konsep Kontribusi, Efektivitas dan Efisiensi	22
1. Kontribusi	22
2. Efektivitas	23
3. Efisiensi	23
BAB III: METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
C. Subyek dan Obyek Penelitian	25
D. Data yang Dicari	26
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Teknik Analisis Data	27
BAB IV: GAMBARAN UMUM PROVINSI DIY	30
A. Sejarah Singkat Berdirinya Provinsi DIY	30
B. Letak Geografis	35
C. Batas Wilayah	35
D. Luas dan Bagian Wilayah	35
E. Keadaan Alam	36
F. Geologi	36
G. Investasi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta	37
BAB V: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	41

A. Deskripsi Data	41
B. Analisis Data dan Pembahasan	42
BAB VI: PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Keterbatasan Penelitian	56
C. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah	44
Tabel 2	Efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	48
Tabel 3	Efisiensi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	52

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	
Surat Keterangan / Ijin.....	61
LAMPIRAN II	
Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2005.....	62
LAMPIRAN III	
Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2006.....	67
LAMPIRAN IV	
Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2007	70
LAMPIRAN V	
Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2008	85
LAMPIRAN VI	
Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2009	100
LAMPIRAN VII	
Persentase Pajak Daerah di Tiap KPPD	115
LAMPIRAN VIII	
Rekapitulasi dan Penentuan Besar Biaya Pemungutan	116
LAMPIRAN IX	
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	117

ABSTRAK

ANALISIS KONTRIBUSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Studi Kasus di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 – 2009

**Roberta Kristina Sulistyawati
062114052
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta**

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui kontribusi yang diberikan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah, (2) mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, (3) mengetahui efisiensi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menghitung kontribusi, efektivitas dan efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005 – 2009.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2005 sampai 2009 memegang peran yang besar dalam mendukung PAD, yakni pada tahun 2005 sebesar 37,14%, tahun 2006 sebesar 39,21%, tahun 2007 sebesar 41,58%, sedangkan kontribusi tahun 2008 sebesar 35,10 dan tahun 2009 sebesar 39,96%, (2) Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor lebih besar dibandingkan dengan Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, oleh karena itu kemampuan para pemungut Pajak Kendaraan Bermotor dalam menjalankan tugas sudah tergolong efektif. Pada tahun 2005 tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 114,79%, tahun 2006 sebesar 123,91%, tahun 2007 sebesar 116,54%, tahun 2008 sebesar 106,58%, dan tahun 2009 tingkat efektivitasnya sebesar 111,08%, (3) Rasio efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi DIY selama tahun 2005 sampai 2009 berkisar antara 1,05% hingga 1,63%. Rasio efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2005 sebesar 1,28%, tahun 2006 sebesar 1,63%, tahun 2007 sebesar 1,63%, tahun 2008 sebesar 1,05%, dan tahun 2009 rasio efisiensinya sebesar 1,43%.

ABSTRACT

**ANALYSIS OF CONTRIBUTION, EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY
OF VEHICLE TAX
A Case Study at Province Government of Yogyakarta Special Region
Province
2005 to 2009**

**Roberta Kristina Sulistyawati
062114052
Sanata Dharma University
Yogyakarta**

The aims of this research were: (1) to know the contribution of Vehicle Tax toward Local Original Revenue, (2) to know the effectiveness of Vehicle Tax, (3) to know the efficiency of Vehicle Tax collection in Yogyakarta Special Region Province.

Technique of data gathering were: interview and documents analysis. Technique of data analysis: quantitative data analysis. Quantitative data analysis was used to calculate the contribution, effectiveness and efficiency of Vehicle Tax in Yogyakarta Special Region Province 2005-2009.

The result of this research showed that: (1) contribution of Vehicle Tax to local original revenue during 2005-2009 had a big role to sup local original revenue, as much as: 37,14%, 39,21%, 41,58%, 35,10% and 39,67%, respectively. (2) The realization of Vehicle Tax was greater than of Motoric Vehicle Tax Target, so that capability of Vehicle Tax officers were categorized as effective. In the year of 2005 the effectiveness index of Vehicle Tax: 114,79%, 2006: 123,91%, 2007: 116,54%, 2008: 106,58% and 2009: 111,08%. (3) The efficiency ratio of Vehicle Tax in Yogyakarta Special Region Province during 2005-2009 was between 1,05% to 1,63%. The efficiency of Vehicle Tax during 2005-2009 periods were: 1,28%, 1,63%, 1,63%, 1,05% and 1,43%, respectively.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Para pemimpin bangsa Indonesia sejak lama telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik yang bersifat material maupun spiritual. Untuk itu pemerintah Indonesia telah berusaha meningkatkan penerimaan negara dalam rangka mencapai tujuan pembangunannya. Dalam menunjang keberhasilan pembangunan diperlukan penerimaan yang kuat. Sumber pembiayaan utama negara diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri, sedangkan penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya sebagai tambahan.

Kemandirian pembangunan tercapai bila negara mampu membiayai pembangunan dengan sumber penerimaan dalam negeri terutama pajak.

Kemandirian pembangunan suatu negara mutlak diperlukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kemandirian pembangunan tingkat provinsi dan kabupaten/ kota tidak bisa dipisahkan dari kebijakan pemerintah pusat. Di Republik Indonesia, kebijakan tentang keuangan daerah dinaungi oleh pemerintah pusat sedemikian sehingga pemerintah

daerah mempunyai kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi.

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi yang maksimal, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan dibidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalian dana dari sumber-sumber daerah. Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- a. Hasil Pajak Daerah.
- b. Hasil Retribusi Daerah.
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tapi pada kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar. Oleh karenanya untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya dengan penggalian potensi daerah melalui Pajak Daerah.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di negara Indonesia yang terdiri dari empat kabupaten dan satu kotamadya. Guna meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk pembangunan, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah.

Penggolongan pajak menurut lembaga pemungutnya terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah, dimana pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan sumber penerimaan yang berpotensi. Pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat rata-rata 12,39% tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sangat menjanjikan untuk mendukung operasional pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal inilah yang membuat penulis ingin mengulas lebih lanjut mengenai Kontribusi, Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka ditemukan masalah-masalah sebagai berikut:

- 1) Berapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005 sampai dengan tahun 2009?
- 2) Bagaimana efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2005 - 2009 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
- 3) Bagaimana efisiensi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2005 - 2009 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui efisiensi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Provinsi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi agar Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengetahui adanya peningkatan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya dan dapat menambah perbendaharaan bacaan khususnya mengenai Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah.

3. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini penulis memperoleh pengalaman dalam penelitian, menambah wawasan dan secara khusus dapat menerapkan ilmu/teori yang didapat dibangku kuliah pada keadaan sebenarnya.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori dari hasil studi pustaka yang menjadi acuan dalam penulisan ini. Uraian

dalam bab ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang dicari, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel serta teknik analisis data.

BAB IV : Gambaran Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam bab ini berisi tentang kondisi geografis daerah, gambaran umum demografi serta kondisi ekonomi daerah.

BAB V : Analisis Data dan Pembahasan

Dalam bab ini menjelaskan tentang pengolahan data, hasil penelitian, penafsiran hasil analisis dengan teknik analisis yang sudah ditetapkan.

BAB VI : Penutup

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan dan saran-saran dari penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dasar-Dasar Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Dalam bukunya yang berjudul “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, Siahaan (2005: 7) menjelaskan mengenai pengertian pajak, yaitu:

Pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, (Mardiasmo, 2006: 1) pajak adalah:

Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Selain itu, pajak juga dapat berarti sebagai suatu pungutan yang diatur menurut peraturan daerah yang nantinya digunakan untuk membiayai rumah tangganya sebagai badan hukum publik (Samudra, 1995: 61).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa pajak merupakan pembayaran wajib yang dikenakan menurut Undang-Undang dan tidak dapat dihindari, dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Pengenaan pajak yang didasarkan pada

Undang-Undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat sewenang-wenang dalam menetapkan besarnya pajak (Siahaan, 2005: 7).

2. Ciri-ciri Pajak

Ciri-ciri pajak menurut Siahaan (2005: 8), adalah:

- a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
- e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
- f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang

3. Fungsi Pajak

Dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, Mardiasmo (2006: 1-2) membagi fungsi pajak menjadi 2, yaitu:

- a. Fungsi Budgetair; pajak digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*); pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

4. Teori Pemungutan Pajak

Macam-macam teori yang memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak (Mardiasmo, 2006: 3-4) adalah:

- a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Maka dari itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

- b. Teori Kepentingan

Pembagian pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

- c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

Untuk mengukur daya pikul dapat menggunakan pendekatan, yaitu:

- 1) Unsur obyektif; yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
- 2) Unsur subyektif; yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

5. Hukum Pajak

Hukum Pajak berfungsi untuk mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 (dua) macam hukum pajak (Mardiasmo, 2006: 5), yaitu:

- a. Hukum Pajak Materiil; memuat norma-norma yang menerangkan mengenai keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak

(objek pajak), siapa yang dikenai pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya hutang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

- b. Hukum Pajak Formil; memuat bentuk/cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).

Hukum ini memuat antara lain:

- 1) Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
- 2) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- 3) Kewajiban Wajib Pajak (misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan), dan hak-hak Wajib Pajak (misalnya mengajukan keberatan dan banding).

6. Tata Cara Pemungutan Pajak

Ada 3 hal yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak, yaitu (Mardiasmo, 2006: 6):

- a. Stelsel Pajak

- 1) Stelsel Nyata (*riël stelsel*)

Berdasarkan stelsel ini, pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan dari stelsel ini adalah nilai

pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

2) Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)

Menurut stelsel anggapan, pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Apabila penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, maka pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan dari stelsel ini, pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi dari stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, dan di akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak yang sebenarnya lebih besar daripada anggapannya, maka Wajib Pajak harus menambah pembayaran. Sebaliknya, jika pajak yang sebenarnya lebih kecil, maka Wajib Pajak dapat meminta kelebihannya.

b. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-Ciri:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.

- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

7. Hambatan Pemungutan Pajak

Ada 2 macam hambatan dalam pemungutan pajak (Mardiasmo, 2006:

8), yaitu:

- a. Perlawanan Pasif

Penyebab masyarakat enggan (pasif) membayar pajak adalah:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

- 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk perlawanan aktif antara lain:

- 1) *Tax Avoidance*; yaitu segala usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- 2) *Tax Evasion*; yaitu segala usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

8. Pengelompokan Pajak

Pajak dikelompokkan menjadi 3, yaitu (Mardiasmo, 2006: 5):

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak Langsung; yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- 2) Pajak Tidak Langsung; yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif; yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

- 2) Pajak Objektif; yaitu pajak yang berdasar pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
- c. Menurut Lembaga Pemungutnya
- 1) Pajak Pusat; yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - 2) Pajak Daerah; yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
 - a) Pajak Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - b) Pajak Kabupaten/Kota: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

9. Macam Tarif Pajak

Ada 4 (empat) macam tarif pajak: (Mardiasmo, 2006: 9), yaitu:

a. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa prosentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

B. Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor merupakan semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. (Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2008)

2. Pengertian Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, penghimpunan data objek, sampai kegiatan pemungutan pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak serta penyetorannya. (Undang-undang Republik Indonesia No.34 Tahun 2000)

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas pemilikan dan atas penguasaan kendaraan bermotor. (Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2008)

3. Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor (Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2007). Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

4. Dasar Pengenaan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor (Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007).

Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Dalam hal harga pasaran umum atas kendaraan bermotor tidak diketahui, nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan:

- a. Isi silinder dan /atau satuan daya;
- b. Jenis, merk, dan tahun pembuatan kendaraan bermotor;
- c. Negara asal kendaraan bermotor;
- d. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.

Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor:

- a. Tekanan gandar
- b. Jenis bahan bakar kendaraan
- c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut (Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2007):

- a. 1,5% untuk KBM bukan umum
- b. 1% untuk KBM umum
- c. 0,5% untuk KBM alat-alat berat dan alat-alat besar

5. Penetapan Besarnya Pajak Kendaraan Bermotor

Penetapan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor ditentukan sebagai berikut (Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2007):

- a. Kendaraan Bermotor Bukan Umum, yakni:

$$\text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan PKB} \times 100\%$$

- b. Kendaraan Bermotor untuk Umum diberikan keringanan sebesar 40%, yakni:

$$\text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan PKB} \times 60\%$$

6. Pengecualian Obyek Pajak Kendaraan Bermotor

Dikecualikan sebagai obyek kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh (Peraturan Gubernur Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2008):

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/kelurahan, yang perolehannya dibiayai melalui APBN/APBD dan atau dari hibah/sumbangan.
- b. Kedutaan, Konsulat Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik.
- c. Pabrik-pabrik atau milik importer dan dealer yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan atau untuk dijual.
- d. Apabila kendaraan bermotor berganti kepemilikan, maka Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sejak terjadi penyerahan dengan dokumen dapat berupa kwitansi pembelian, risalan lelang, akta/ pernyataan hibah atau Berita Acara Penyerahan.

C. Pendapatan Daerah

Sumber-sumber Pendapatan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999:

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak provinsi yang terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C
- 7) Pajak Parkir

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

3. Lain-lain Penerimaan yang Sah

Lain-lain Penerimaan yang Sah terdiri dari (Nurlan, 2008: 136):

- a. hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan,

- b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,
- c. jasa giro,
- d. bunga deposito,
- e. penerimaan atas tuntutan ganti rugi,
- f. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
- g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
- h. pendapatan denda pajak,
- i. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan,
- j. pendapatan dari pengembalian,
- k. fasilitas sosial dan fasilitas umum,
- l. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,
- m. pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan.

D. Konsep Kontribusi, Efektivitas dan Efisiensi

1. Kontribusi

Makna kontribusi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah uang iuran. Apabila dikaitkan dengan topik penelitian, maka kontribusi disini adalah sumbangan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Efektivitas

Efektivitas menurut The Liang Gie dalam buku “Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah” (Halim, 2004: 166) adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya.

Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak daerah, maka efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan penerimaan Pajak Daerah yang direncanakan dibanding dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen, sehingga apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi, menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Efektivitas menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak, menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan. (Halim, 2004: 135)

3. Efisiensi

Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan

dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja Pemerintah Daerah yang bersangkutan semakin baik. Selain mencakup biaya langsung kantor pajak yang bersangkutan, efisiensi juga memperhitungkan biaya tidak langsung bagi kantor pajak. (Halim, 2004: 134).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek tertentu dan kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian ini hanya berlaku untuk objek yang diteliti dalam waktu tertentu.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Tentara Pelajar 15 Yogyakarta

Waktu Penelitian : Februari - Maret 2010

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang atau badan yang berhubungan dengan objek penelitian atau mereka yang memiliki informasi tentang objek penelitian. Yang menjadi subjek penelitian adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah realisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah, biaya pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang berasal dari tahun 2005 sampai tahun 2009.

D. Data yang Dicari

Data yang akan dicari dalam penelitian ini adalah:

1. Gambaran umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Adalah pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada subjek penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada staf yang berwenang di Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan untuk mengetahui kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), terlebih dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi PKB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

Analisis yang digunakan untuk mengukur tinggi efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah dengan menggunakan rumus (Mahmudi, 2005: 129):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target Penerimaan PKB}} \times 100\%$$

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 1 (satu) atau 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang semakin baik. (Halim, 2001: 263)

Analisis yang digunakan untuk mengetahui tinggi efisiensi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah dengan menggunakan rumus (Mahmudi, 2005: 129):

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PKB}}{\text{Realisasi Penerimaan PKB}} \times 100\%$$

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. (Halim, 2001: 264)

Biaya Pemungutan adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan staf Bidang Anggaran Pendapatan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut beliau, yang menjadi unsur biaya pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

1. Gaji dan tunjangan pegawai
2. Penyediaan jasa surat menyurat
3. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5. Penyediaan jasa administrasi keuangan
6. Penyediaan jasa kebersihan kantor
7. Penyediaan alat tulis kantor

8. Penyediaan barang cetak dan pengadaan
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11. Penyediaan makanan dan minuman
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
13. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
14. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
15. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
16. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
17. Pemeliharaan rutin/ berkala arsip surat kendaraan bermotor
18. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
19. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Berdirinya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disingkat dengan DIY adalah salah satu daerah otonom setingkat provinsi yang ada di Indonesia. Propinsi ini beribukota di Yogyakarta. Dari nama daerah ini yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus statusnya sebagai Daerah Istimewa. Status sebagai Daerah Istimewa berkenaan dengan runutan sejarah berdirinya propinsi ini, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut Babad Gianti, Yogyakarta atau *Ngayogyakarta* (bahasa Jawa) adalah nama yang diberikan Paku Buwono II (raja Mataram tahun 1719-1727) sebagai pengganti nama pesanggrahan Gartitawati. Yogyakarta berarti *Yogya* yang kerta, *Yogya* yang makmur, sedangkan *Ngayogyakarta Hadiningrat* berarti *Yogya yang makmur dan yang paling utama*. Sumber lain mengatakan, nama Yogyakarta diambil dari nama (ibu) kota *Sanskrit Ayodhya* dalam epos Ramayana. Dalam penggunaannya sehari-hari, Yogyakarta lazim diucapkan Jogja(karta) atau Ngayogyakarta (bahasa Jawa).

Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah mempunyai tradisi pemerintahan karena Yogyakarta adalah Kasultanan, termasuk di dalamnya terdapat juga Kadipaten Pakualaman. Daerah yang mempunyai asal-usul dengan pemerintahannya sendiri, di jaman penjajahan Hindia Belanda

disebut *Zelfbesturende Landschappen*. Di jaman kemerdekaan disebut dengan nama Daerah Swapraja.

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri sejak 1755 didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Kadipaten Pakualaman, berdiri sejak 1813, didirikan oleh Pangeran Notokusumo, (saudara Sultan Hamengku Buwono II) kemudian bergelar Adipati Paku Alam I.

Baik Kasultanan maupun Pakualaman, diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Semua itu dinyatakan di dalam kontrak politik. Terakhir kontrak politik Kasultanan tercantum dalam *Staatsblad* 1941 No. 47 dan kontrak politik Pakualaman dalam *Staatsblaad* 1941 No. 577.

Pada saat Proklamasi Kemerdekaan RI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengetok kawat kepada Presiden RI, menyatakan bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi bagian wilayah Negara Republik Indonesia, serta bergabung menjadi satu mewujudkan satu kesatuan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Pegangan hukumnya adalah :

- a. Piagam kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden Republik Indonesia.

- b. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Amanat Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (yang dibuat sendiri-sendiri secara terpisah)
- c. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (yang dibuat bersama dalam satu naskah).

Dari 4 Januari 1946 hingga 17 Desember 1949, Yogyakarta menjadi Ibukota Negara Republik Indonesia, justru dimasa perjuangan bahkan mengalami saat-saat yang sangat mendebarkan, hampir-hampir saja Negara Republik Indonesia tamat riwayatnya. Oleh karena itu pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia yang berkumpul dan berjuang di Yogyakarta mempunyai kenangan tersendiri tentang wilayah ini. Apalagi pemuda-pemudanya yang setelah perang selesai, melanjutkan studinya di Universitas Gajah Mada, sebuah Universitas Negeri yang pertama didirikan oleh Presiden Republik Indonesia, sekaligus menjadi monumen hidup untuk memperingati perjuangan Yogyakarta.

Pada saat ini Kraton Yogyakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Puro Pakualaman oleh Sri Paduka Paku Alam IX. Keduanya memainkan peranan yang sangat menentukan di dalam memelihara nilai-nilai budaya dan adat-istiadat Jawa dan merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta.

Dengan dasar pasal 18 Undang-undang 1945, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menghendaki agar kedudukan sebagai Daerah Istimewa untuk Daerah Tingkat I, tetap lestari dengan

mengingat sejarah pembentukan dan perkembangan Pemerintahan Daerahnya yang sepatutnya dihormati.

Pasal 18 undang-undang dasar 1945 itu menyatakan bahwa “ pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-daerah yang bersifat Istimewa “.

Sebagai Daerah Otonom setingkat Propinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan Undang-undang No.3 tahun 1950, sesuai dengan maksud pasal 18 UUD 1945 tersebut. Disebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta adalah meliputi bekas Daerah/Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman.

Sebagai ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta kaya predikat, baik berasal dari sejarah maupun potensi yang ada, seperti sebagai kota perjuangan, kota kebudayaan, kota pelajar, dan kota pariwisata.

Sebutan kota perjuangan untuk kota ini berkenaan dengan peran Yogyakarta dalam konstelasi perjuangan bangsa Indonesia pada jaman kolonial Belanda, jaman penjajahan Jepang, maupun pada jaman perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yogyakarta pernah menjadi pusat kerajaan, baik Kerajaan Mataram (Islam), Kesultanan Yogyakarta maupun Kadipaten Pakualaman.

Sebutan kota kebudayaan untuk kota ini berkaitan erat dengan peninggalan-peninggalan budaya bernilai tinggi semasa kerajaan-kerajaan

tersebut yang sampai kini masih tetap lestari. Sebutan ini juga berkaitan dengan banyaknya pusat-pusat seni dan budaya. Sebutan kata Mataram yang banyak digunakan sekarang ini, tidak lain adalah sebuah kebanggaan atas kejayaan Kerajaan Mataram.

Predikat sebagai kota pelajar berkaitan dengan sejarah dan peran kota ini dalam dunia pendidikan di Indonesia. Di samping adanya berbagai pendidikan di setiap jenjang pendidikan tersedia di propinsi ini, di Yogyakarta terdapat banyak mahasiswa dan pelajar dari seluruh daerah di Indonesia. Tidak berlebihan bila Yogyakarta disebut sebagai miniatur Indonesia.

Sebutan Yogyakarta sebagai kota pariwisata menggambarkan potensi propinsi ini dalam kacamata kepariwisataan. Yogyakarta adalah daerah tujuan wisata terbesar kedua setelah Bali. Berbagai jenis obyek wisata dikembangkan di wilayah ini, seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata pendidikan, bahkan, yang terbaru, wisata malam.

Disamping predikat-predikat di atas, sejarah dan status Yogyakarta merupakan hal menarik untuk disimak. Nama daerahnya memakai sebutan DIY sekaligus statusnya sebagai Daerah Istimewa. Status Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa berkenaan dengan runutan sejarah Yogyakarta, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

B. Letak Geografis

Secara geografis, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara $70^{\circ} 33' \text{ LS} - 8^{\circ} 12' \text{ LS}$ dan $110^{\circ} 00' \text{ BT} - 110^{\circ} 50' \text{ BT}$. Komponen fisiografi yang menyusun Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 (empat) satuan fisiografis yaitu Satuan Pegunungan Selatan (Dataran Tinggi Karst) dengan ketinggian tempat berkisar antara 150 - 700 meter, Satuan Gunungapi Merapi dengan ketinggian tempat berkisar antara 80 - 2.911 meter, Satuan Dataran Rendah yang membentang antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulonprogo pada ketinggian 0 - 80 meter, dan Pegunungan Kulonprogo dengan ketinggian hingga 572 meter.

C. Batas Wilayah

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan tengah Pulau Jawa yang dibatasi oleh Samudera Hindia di bagian selatan dan Provinsi Jawa Tengah di bagian lainnya. Batas dengan Provinsi Jawa Tengah meliputi:

1. Kabupaten Wonogiri di bagian tenggara
2. Kabupaten Klaten di bagian timur laut
3. Kabupaten Magelang di bagian barat laut
4. Kabupaten Purworejo di bagian barat

D. Luas dan Pembagian Wilayah

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai luas 3.185,80 km², terdiri dari empat kabupaten dan satu Kotamadya, yaitu:

- a. Kota Yogyakarta
- b. Kabupaten Sleman
- c. Kabupaten Bantul
- d. Kabupaten Gunungkidul
- e. Kabupaten Kulonprogo.

Setiap kabupaten/kota mempunyai kondisi fisik yang berbeda sehingga potensi alam yang tersedia juga tidak sama. Perbedaan kondisi fisik ini ikut menentukan dalam rencana pengembangan daerah.

E. Keadaan Alam

Curah hujan tahunan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 718 mm/th sampai 2992.3 mm/th, curah hujan yang rendah umumnya dijumpai di wilayah Gunungkidul dan Bantul, sedangkan curah hujan yang relatif tinggi dijumpai di wilayah Sleman.

F. Geologi

Informasi geologi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperoleh dari Peta Geologi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta skala 1:100.000 tahun 1977. Formasi daerah penelitian terdiri dari Aluvium (Qa), Formasi Gunungapi Merapi (Qvm), Endapan Vulkanik Merapi Muda (Qmi), Endapan Vulkanik Merapi Tua (Qmo), Formasi Kepek (Tm_{pk}), Formasi Wonosari - Punung (Tm_{wl}), Formasi Sentolo (Tm_{ps}), Formasi Oyo (Tmo), Formasi Wuni (Tmw), Formasi Sambipitu (Tm_{ss}), Formasi Semilir (Tms), Formasi

Nglanggran (Tmng), Formasi Kebo-Butak (Tomk), dan Formasi Mandalika (Towm).

Daerah ini mempunyai struktur geologi lipatan dan patahan. Lipatan terdiri dari antiklin dan sinklin terdapat pada Formasi Semilir (Tms), Formasi Oya (Tmo), Formasi Wonosari-Punung (Tmwl) dan Formasi Kepek (Tmpk). Patahan berupa sesar turun dengan pola *antithetic fault block*, terdapat antara lain pada terban Bantul.

G. Investasi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta

Provinsi D.I. Yogyakarta terletak di bagian tengah Pulau Jawa dengan luas wilayah 3.185,80 Km². Bagian selatan wilayah provinsi ini berbatasan dengan Lautan Indonesia, sedangkan di bagian utara, timur dan barat berbatasan dengan provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, provinsi ini terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan satu kota yaitu kabupaten Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul, Sleman dan kota Yogyakarta. Pada tahun 2005, DI Yogyakarta mempunyai jumlah penduduk sekitar 3.281.800 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,88% dan kepadatan penduduk sebesar 1.030 jiwa per Km².

Pada tahun 2005, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DI Yogyakarta mencapai angka Rp 16,94 triliun. Dari angka tersebut, kontribusi terbesar datang dari sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp 3,46 triliun atau sekitar 20,4% dari total PDRB, disusul dengan sektor pertanian

sebesar Rp. 3,19 triliun atau sekitar 18,9% dan sektor jasa-jasa sebesar Rp 2,85 triliun atau sekitar 16,8%, sebagaimana grafik disamping.

Pada tahun 2005, tercatat beberapa komoditi unggulan yang dihasilkan di provinsi ini. Untuk tanaman pangan yaitu padi sawah, padi ladang, padi ladang, jagung kacang tanah dan kacang kedelai. Tanaman perkebunan yang potensial di provinsi ini adalah kelapa dan tebu.

Untuk kegiatan ekspor, pada tahun 2005 provinsi ini mampu mencapai nilai ekspor sebesar US\$ 107,6 miliar, dengan kontribusi terbesar disumbangkan oleh ekspor pakaian jadi sebesar US\$ 45,1 miliar disusul oleh ekspor meubel kayu sebesar US\$ 42,6 miliar, kemudian disusul ekspor sarung tangan kulit, kulit yang disamak dan yang terakhir adalah ekspor lampu.

Untuk mendukung pertumbuhan perekonomian, DI Yogyakarta memiliki 2 (dua) kawasan industri yaitu Kawasan Salamrejo yang terletak di Kabupaten Sleman dan Kawasan Piyungan di Kabupaten Bantul. Untuk moda udara, provinsi ini telah memiliki bandar udara yaitu Bandar Udara Adisutjipto yang berlokasi di Kota Yogyakarta.

Potensi sumberdaya alam bervariasi, seperti pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan. Lahan sawah irigasi teknis sebesar 18.506 ha (138,27%), dan non irigasi teknis sebesar 29,848 ha 61,72%). Luas lahan palawija, hortikultura, dan sayur sayuran sebagian besar ditanami jagung dan kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu, dengan perincian jagung seluas 79,704 ha, kedelai 34.292 ha, kacang tanah 67.759 ha, dan ubi kayu 58,735 ha, sedangkan sisanya berupa kacang hijau, ubi jalar, dan sayur sayuran.

Adapun jumlah produksi palawija, hortikultura dan sayur sayuran adalah jagung sebanyak 219.758 ton, padi 715,684 ton, kedelai 402 ton, kacang tanah 66.697 ton, kacang hijau 550 ton, ubi kayu 978,494, Ubi jalar 6.777 ton, sayuran 67.703 ton, dan buah buahan 197.204 ton. Menurut jenis komoditas kehutanan yang dikembangkan berupa produk kayu dan non kayu. Luas kawasan hutan seluas 74.992,97 ha (23,54% dari luas wilayah), dengan perincian hutan Negara 18.044,97 ha (5,66%), hutan rakyat 54,948 ha (17,88%). Sementara itu, produksi kayu terdiri dari jati 111.930,393 m³, mahoni 16.490,574 m³, sono keling 8.412,866 m³, akasia 3.292,287 m³ dan rimba campur 2.787,235 m³, maka dihasilkan kayu bulat sebanyak 8.022.009,30 m³. Potensi dan pemanfaatan bidang kelautan dan perikanan terdiri dari perairan umum sebesar 3.133,5 ha (tingkat pemanfaatan 5,20 ha), rambak 650 ha tingkat pemanfaatan 58 ha), sawah tambak 240 ha belum dimanfaatkan), kolam 4.630,2 ha (tingkat pemanfaatan 915 ha), dan Mina Padi 10.265,6 ha (tingkat pemanfaatan 1,233 ha). Di samping itu, potensi dan tingkat pemanfaatan sumber daya alam khususnya perikanan di Selatan Jawa, terdiri dari puluhan ton/tahun tingkat pemanfaatan 45%, mencapai 25.000 ton/tahun tingkat pemanfaatan 18.000 ton/tahun tingkat pemanfaatan 44%, tenggiri 10.000 ton/tahun tingkat pemanfaatannya 11%, dan pelagis kecil 431.000 ton/tahun.

Potensi peternakan di antaranya populasi ternak sapi potong 249.480 ekor, sapi perah dengan produksi 8.623 ekor dengan jumlah produksi 8,900.215 liter/tahun, ternak kecil, dan unggas. Dari seluruh jenis peternakan

tersebut, ternak unggas cukup besar, yaitu ayam buras 4.604.824 ekor/tahun, ayam petelur 2 494.008 ekor/tahun, dan ayam pedaging 22.020,306 ekor.

Di bidang perkebunan, terdapat banyak potensi di antaranya teh, kopi, tembakau, kakao, lada, kelapa, vanili, dan tebu. Dari jenis tanaman perkebunan, areal tanaman kelapa mempunyai areal yang cukup besar, yaitu 44,119,59 ha.

Di bidang pertambangan dan energi, terdapat 28 jenis bahan galian, naik dari golongan B maupun golongan C yang mendominasi adalah batu kapur putih memiliki potensi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 621.073,6 ton, serta beberapa jenis tambang lainnya, seperti andesit (44,097,2 ton), bentonit/abu bumi (1.699,16 ton), dan kaolin/feldstar (1.225 ton).

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD, efektivitas dan efisiensi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Telah kita ketahui, bahwa pajak merupakan pendapatan terbesar dari negeri ini, dan karena adanya otonomi daerah, kini tiap daerah dapat mengelola keuangan daerahnya secara mandiri. Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah.

Dari beberapa jenis pajak yang ada, penelitian kali ini difokuskan pada pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor. Jenis kendaraan bermotor yang diteliti mencakup kendaraan pribadi dan kendaraan umum.

Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan adalah Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2005-2009. Dari laporan tersebut dapat diperoleh data mengenai target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, serta target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Data tersebut akan dianalisis menggunakan rumus yang telah

ditentukan untuk memecahkan permasalahan yang ada dan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

B. Analisis Data dan Pembahasan

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian digunakan untuk menganalisis permasalahan berikut:

1. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2005-2009.

$$\text{Kontribusi PKB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut, maka dapat dihitung kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD, yaitu:

- a. Persentase kontribusi tahun 2005:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Rp}149.291.828.905,00}{\text{Rp}401.912.337.894,18} \times 100\% \\ &= 37,14\% \end{aligned}$$

Berarti pada tahun 2005 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi sebesar 37,14% dari total Pendapatan Asli Daerah.

- b. Persentase kontribusi tahun 2006:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Rp}171.146.972.390,00}{\text{Rp}436.497.274.575,62} \times 100\% \\ &= 39,21\% \end{aligned}$$

Berarti pada tahun 2006 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi sebesar 39,21% dari total Pendapatan Asli Daerah.

c. Persentase kontribusi tahun 2007:

$$= \frac{\text{Rp}199.659.041.270,00}{\text{Rp}480.181.759.199,50} \times 100\%$$

$$= 41,58\%$$

Berarti pada tahun 2007 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi sebesar 41,58% dari total Pendapatan Asli Daerah.

d. Persentase kontribusi tahun 2008:

$$= \frac{\text{Rp}222.137.597.800,00}{\text{Rp}632.872.311.670,13} \times 100\%$$

$$= 35,10\%$$

Berarti pada tahun 2008 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi sebesar 35,10% dari total Pendapatan Asli Daerah.

e. Persentase kontribusi tahun 2009:

$$= \frac{\text{Rp}258.278.414.295,00}{\text{Rp}646.384.918.488,57} \times 100\%$$

$$= 39,96\%$$

Berarti pada tahun 2009 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi sebesar 39,67% dari total Pendapatan Asli Daerah.

Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor
Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2005	149.291.828.905,00	401.912.337.894,18	37,14
2006	171.146.972.390,00	436.497.274.575,62	39,21
2007	199.659.041.270,00	480.181.759.199,50	41,58
2008	222.137.597.800,00	632.872.311.670,13	35,10
2009	258.278.414.295,00	646.384.918.488,57	39,96

Sumber: data primer diolah

Dari perhitungan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2005-2009 menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Dapat dilihat bahwa dari tahun 2005 hingga 2007, Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2008, Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan dan pada tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan kembali.

Pada tahun 2005, terlihat bahwa persentase kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD sebesar 37,14%. Ini berarti bahwa pada tahun 2005, Pajak Kendaraan Bermotor memberikan sumbangan

sebesar 37,14% pada PAD atau memberi kontribusi sebesar Rp149.291.828.905,00 dari total penerimaan PAD sebesar Rp401.912.337.894,18.

Di tahun 2006, terjadi peningkatan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD sebesar 2,07%, sehingga menjadi 39,21%. Hal ini tampak dari nilai perolehan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp171.146.972.390,00 dan PAD sebesar Rp436.497.274.575,62. Disini terlihat bahwa Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar Rp21.855.143.485,00 dari tahun 2005. Begitu juga untuk penerimaan PAD mengalami kenaikan Rp34.584.936.681,44 sehingga Pajak Kendaraan Bermotor memberi kontribusi sebesar 39,21% terhadap PAD.

Demikian pula yang terjadi di tahun 2007, dimana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan Rp28.512.068.880,00 dari tahun 2006, demikian juga dengan perolehan PAD yang naik sebesar Rp43.684.484.623,88. Perubahan ini membuat Pajak Kendaraan Bermotor yang berhasil diperoleh menjadi sebesar Rp199.659.041.270,00 dan PAD menjadi Rp480.181.759.199,50 dimana persentase kontribusinya meningkat sebesar 2,37% dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 41,58%. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2007, kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD sebesar 41,58%. Ini merupakan kontribusi terbesar selama tahun 2005 hingga 2007.

Pada tahun 2008, kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD mengalami penurunan sebesar 6,48% hingga menjadi 35,10%. Pajak Kendaraan Bermotor yang diperoleh ditahun 2008 sebesar Rp222.137.597.800,00 sedangkan PAD yang diperoleh sebesar Rp632.872.311.670,13. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2008 merupakan kontribusi terkecil yang diperoleh selama tahun 2005 hingga 2008.

Untuk tahun 2009, kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor naik sebesar 4,86% menjadi 39,96%. Pajak Kendaraan Bermotor yang berhasil diperoleh sebesar Rp258.278.414.295,00 dan PAD-nya sebesar Rp646.384.918.488,57. Jadi dari tahun 2008 terjadi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp36.140.816.495,00 dan PAD bertambah sebesar Rp 13.512.606.818,44. Untuk tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor menyumbang 39,96% terhadap penerimaan PAD.

2. Analisis efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari tahun 2005-2009.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target Penerimaan PKB}} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut, maka dapat dihitung efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu:

- a. Rasio efektivitas tahun 2005:

$$= \frac{\text{Rp}149.291.828.905,00}{\text{Rp}130.059.012.000,00} \times 100\%$$

$$= 114,79\%$$

Berarti pada tahun 2005, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor lebih tinggi 14,79% dari 100% Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

- b. Rasio efektivitas tahun 2006:

$$= \frac{\text{Rp}171.146.972.390,00}{\text{Rp}138.123.360.000,00} \times 100\%$$

$$= 123,91\%$$

Berarti pada tahun 2006, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor lebih tinggi 23,91% dari 100% Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

- c. Rasio efektivitas tahun 2007:

$$= \frac{\text{Rp}199.659.041.270,00}{\text{Rp}171.324.990.700,00} \times 100\%$$

$$= 116,54\%$$

Berarti pada tahun 2007, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor lebih tinggi 16,54% dari 100% Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

- d. Rasio efektivitas tahun 2008:

$$= \frac{\text{Rp}222.137.597.800,00}{\text{Rp}208.414.628.000,00} \times 100\%$$

$$= 106,58\%$$

Berarti pada tahun 2008, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor lebih tinggi 6,58% dari 100% Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

e. Rasio efektivitas tahun 2009:

$$= \frac{\text{Rp}258.278.414.295,00}{\text{Rp}232.505.419.000,00} \times 100\%$$

$$= 111,08\%$$

Berarti pada tahun 2009, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor lebih tinggi 11,08% dari 100% Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Target Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Efektivitas (%)	Keterangan
2005	149.291.828.905,00	130.059.012.000,00	114,79	Efektif
2006	171.146.972.390,00	138.123.360.000,00	123,91	Efektif
2007	199.659.041.270,00	171.324.990.700,00	116,54	Efektif
2008	222.137.597.800,00	208.414.628.000,00	106,58	Efektif
2009	258.278.414.295,00	232.505.419.000,00	111,08	Efektif

Sumber: data primer diolah

Dari perhitungan efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2005-2009 menunjukkan hasil yang efektif. Hal ini dapat dilihat dari persentase efektivitas yang selalu melebihi 100% tiap tahunnya. Pada tahun 2005 realisasi Pajak Kendaraan Bermotor yang berhasil dicapai sebesar Rp149.291.828.905,00 sedangkan besarnya target Pajak Kendaraan Bermotor adalah Rp130.059.012.000,00 yang menghasilkan tingkat efektivitas sebesar 114,79%.

Pada tahun 2006 realisasi Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan yang signifikan menjadi Rp171.146.972.390,00 dan besarnya target Pajak Kendaraan Bermotor adalah Rp138.123.360.000,00. Kemudian dapat diperoleh tingkat efektivitas sebesar 123,91%. Ditahun 2006 terjadi peningkatan tingkat efektivitas sebesar 9,12%. Disini terlihat bahwa Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar Rp21.855.143.485,00 dari tahun 2005. Begitu juga untuk Target Pajak Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan Rp8.064.348.000,00.

Pada tahun 2007 terjadi penurunan persentase efektivitas sebesar 7,37%, yaitu menjadi 116,54%. Hal ini tampak pada nilai perolehan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp199.659.041.270,00 dan target Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp171.324.990.700,00.

Pada tahun 2008, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan Rp22.478.556.530,00 dari tahun 2007, demikian juga dengan Target Pajak Kendaraan Bermotor yang naik sebesar Rp37.089.637.300,00. Perubahan ini membuat realisasi Pajak Kendaraan

Bermotor yang berhasil diperoleh menjadi sebesar Rp222.137.597.800,00 dan Target Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp208.414.628.000,00. Persentase efektivitas tahun 2008 menurun sebesar 9,96% dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 106,58%.

Pada tahun 2009, persentase efektivitas mengalami kenaikan sebesar 4,5% menjadi 111,08%, dimana Pajak Kendaraan Bermotor naik menjadi Rp258.278.414.295,00 dan Target Pajak Kendaraan Bermotor naik menjadi Rp232.505.419.000,00.

3. Analisis efisiensi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari tahun 2005-2009.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PKB}}{\text{Realisasi Penerimaan PKB}} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut, maka dapat dihitung efisiensi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu:

- a. Rasio efisiensi tahun 2005:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Rp1.911.230.126,00}}{\text{Rp149.291.828.905,00}} \times 100\% \\ &= 1,28\% \end{aligned}$$

Berarti, untuk memperoleh Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp149.291.828.905,00 digunakan Biaya Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 1,28% dari Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atau sebesar Rp1.911.230.126,00.

b. Rasio efisiensi tahun 2006:

$$= \frac{\text{Rp}2.789.431.431,00}{\text{Rp}171.146.972.390,00} \times 100\%$$

$$= 1,63\%$$

Berarti, untuk memperoleh Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp171.146.972.390,00 digunakan Biaya Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 1,63% dari Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atau sebesar Rp2.789.431.431,00.

c. Rasio efisiensi tahun 2007:

$$= \frac{\text{Rp}3.258.492.863,00}{\text{Rp}199.659.041.270,00} \times 100\%$$

$$= 1,63\%$$

Berarti, untuk memperoleh Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp199.659.041.270,00 digunakan Biaya Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 1,63% dari Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atau Rp3.258.492.863,00.

d. Rasio efisiensi tahun 2008:

$$= \frac{\text{Rp}2.330.161.867,00}{\text{Rp}222.137.597.800,00} \times 100\%$$

$$= 1,05\%$$

Berarti, untuk memperoleh Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp222.137.597.800,00 digunakan Biaya Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 1,05% dari Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atau sebesar Rp2.330.161.867,00.

e. Rasio efisiensi tahun 2009:

$$= \frac{\text{Rp}3.694.404.520,00}{\text{Rp}258.278.414.295,00} \times 100\%$$

$$= 1,43\%$$

Berarti, untuk memperoleh Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp258.278.414.295,00 digunakan Biaya Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 1,43% dari Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atau sebesar Rp3.694.404.520,00.

Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Efisiensi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Biaya Pemungutan PKB (Rp)	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Efisiensi (%)	Keterangan
2005	1.911.230.126,00	149.291.828.905,00	1,28	Efisien
2006	2.789.431.431,00	171.146.972.390,00	1,63	Efisien
2007	3.258.492.863,00	199.659.041.270,00	1,63	Efisien
2008	2.330.161.867,00	222.137.597.800,00	1,05	Efisien
2009	3.694.404.520,00	258.278.414.295,00	1,43	Efisien

Sumber: data primer diolah

Pada tahun 2005, Biaya Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.911.230.126,00 dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Rp149.291.828.905,00 yang menghasilkan persentase efisiensi 1,28%.

Pada tahun 2006, terjadi penurunan persentase efisiensi sebesar 0,35% menjadi 1,63%. Hal ini tampak dari Biaya Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.789.431.431,00 dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotornya Rp171.146.972.390,00. Disini terlihat bahwa Biaya Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan sebesar Rp878.201.305,00 dari tahun 2005. Begitu juga untuk Realisasi Pajak Kendaraan Bermotornya Rp21.855.143.485,00 sehingga persentase efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 1,63%.

Pada tahun 2007 persentase efisiensi tidak mengalami perubahan yakni sebesar 1,63%. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan sebesar Rp28.512.068.880,00 dari tahun 2006, demikian juga Biaya Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang naik sebesar Rp469.061.432,00. Perubahan ini membuat Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor yang berhasil diperoleh menjadi sebesar Rp199.659.041.270,00 dan Biaya Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor menjadi Rp3.258.492.863,00.

Pada tahun 2008, efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan 0,58% dari tahun sebelumnya menjadi 1,05%. Biaya Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.330.161.867,00 sedangkan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp222.137.597.800,00. Tingkat efisiensi tahun 2008 merupakan efisiensi yang terbaik selama 2005 hingga 2008.

Pada tahun 2009, persentase efisiensi mengalami penurunan sebesar 0,38% menjadi 1,43%. Persentase ini diperoleh karena adanya peningkatan Biaya Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.364.242.653,00 menjadi Rp3.694.404.520,00. Begitu pula untuk Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan sebesar Rp36.140.816.495,00 menjadi Rp258.278.414.295,00.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2005 sampai 2009 yakni pada tahun 2005 sebesar 37,14%, tahun 2006 sebesar 39,21%, tahun 2007 sebesar 41,58%, sedangkan kontribusi tahun 2008 sebesar 35,10% dan tahun 2009 sebesar 39,96%.
2. Rasio efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor selama 5 tahun yang diteliti yaitu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 tingkat efektivitasnya sudah melampaui 100%, hal ini disebabkan karena realisasi Pajak Kendaraan Bermotor lebih besar dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini berarti kemampuan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan tugas sudah tergolong efektif. Pada tahun 2005 tingkat efektivitasnya sebesar 114,79%, tahun 2006 sebesar 123,91%, tahun 2007 sebesar 116,54%, tahun 2008 sebesar 106,58%, dan tahun 2009 tingkat efektivitasnya sebesar 111,08%. Setiap tahunnya target Pajak Kendaraan Bermotor dapat terealisasi sesuai dengan yang telah ditargetkan

bahkan untuk setiap tahunnya realisasi Pajak Kendaraan Bermotor yang diterima dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan.

3. Rasio efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi DIY selama tahun 2005 sampai 2009 berkisar antara 1,05% hingga 1,63%. Rasio efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2005 sebesar 1,28%, tahun 2006 sebesar 1,63%, tahun 2007 sebesar 1,63%, tahun 2008 sebesar 1,05%, dan tahun 2009 rasio efisiensinya sebesar 1,43%. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi DIY tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 tergolong efisien.

B. Keterbatasan Penelitian

Untuk mengetahui kriteria tingkat efektivitas dan efisiensi, penulis hanya dapat menarik kesimpulan berdasarkan pendapat para ahli mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi. Hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang ini.

C. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis antara lain:

1. Sehubungan dengan efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor sebaiknya Pemerintah Provinsi DIY dapat lebih menunjukkan biaya pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor secara lebih spesifik, yaitu dengan cara memberi

penjelasan mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor sehingga tidak menyulitkan bagi peneliti dalam melakukan penelitian mengenai efisiensi keuangan daerah, sekaligus dalam melakukan evaluasi terhadap ukuran efisiensi. Pemerintah juga sebaiknya lebih dapat menetapkan standar efektivitas yang jelas untuk performa kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik yang sama, dianjurkan untuk melakukan penelitian atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama karena sebenarnya kedua pajak itu saling berkaitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Indeks.
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Mahmudi. 2005. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- , (2007). *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah*.

-----, (2007). *Peraturan Gubernur Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.*



-----, (2008). *Peraturan Gubernur Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.*

Samudra, Azhari A. 1995. *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I: Surat Keterangan/ Izin

	PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEKRETARIAT DAERAH Kepatihan – Danurejan, Yogyakarta – 55213
<u>SURAT KETERANGAN/IJIN</u> Nomor : 070/ 0668	
Membaca Surat :	Kaprodi Akuntansi Fak. Ekonomi USD Yogyakarta Nomor : 31/Kaprodi Akt/568/II/2010
Tanggal Surat :	3 Februari 2010. Perihal : Ijin Penelitian.
Mengingat :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, badan usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dijijinkan	untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan pengkajian/studi di lapangan*)
N a m a	: ROBERTA KRISTINA SULISTYAWATI NIP/NIM : 062114052
Alamat	: Mrican Yogyakarta
Untuk Keperluan:	ANALISIS KONTRIBUSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH STUDI KASUS PADA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2006-2009
Lokasi	: Yogyakarta
Waktu	: 3 (tiga) Bulan Mulai Tanggal : 4 Februari s/d 4 Mei 2010
<u>Ketentuan:</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin; 2. Menyerahkan <i>soft copy</i> hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam <i>compact disk (CD)</i>, dan menunjukkan cetakan asli; 3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah; 4. Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali; 5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. 	
Dikeluarkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 4 Februari 2010	
An. Sekretaris Daerah Asisten Perencanaan dan Pembangunan UB. Kepala Biro Administrasi Pembangunan	
 SURAT DJUMADAL NIP. 19560403.198209 1 001	
<u>Tembusan disampaikan Kepada Yth.</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan) 2. Walikota Yogyakarta cq. Ka. Dinas Perizinan; 3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY 4. Kaprodi Akuntansi Fak. Ekonomi USD Yogyakarta 5. Yang Bersangkutan. 	

Lampiran II: Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2005

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD DI Kota	
	Keterangan	Jumlah
2005	APARATUR DAERAH	
	BELANJA ADMINISTRASI UMUM	
	BELANJA PEGAWAI/ PERSONALIA	
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	403.933.725,00
	Tunjangan tambahan penghasilan	9.000.000,00
	Uang sidang/ rapat	2.167.500,00
	BELANJA BARANG DAN JASA	
	Biaya jasa pihak ketiga	41.400.000,00
	Biaya bahan pakai habis kantor	49.870.700,00
	Biaya jasa kantor	127.706.500,00
	Biaya cetak dan penggandaan	15.575.700,00
	Biaya makanan dan minuman	1.545.000,00
	BELANJA PERJALANAN DINAS	
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.091.000,00
	BELANJA PEMELIHARAAN	
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik	3.925.000,00
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	64.080.100,00
	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan	10.986.500,00
	Pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga	12.153.500,00
	PELAYANAN PUBLIK	
	BELANJA OPERASI & PEMELIHARAAN	
	Uang sidang/ rapat	2.607.000,00

Tahun	KPPD Bantul	
	Keterangan	Jumlah
2005	APARATUR DAERAH	
	BELANJA ADMINISTRASI UMUM	
	BELANJA PEGAWAI/ PERSONALIA	
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	377.700.549,00
	Tunjangan tambahan penghasilan	8.760.000,00
	Uang sidang/ rapat	1.130.000,00
	BELANJA BARANG DAN JASA	
	Biaya jasa pihak ketiga	22.287.200,00
	Biaya bahan pakai habis kantor	13.482.000,00
	Biaya jasa kantor	90.859.594,00
	Biaya cetak dan penggandaan	5.812.150,00
	Biaya makanan dan minuman	790.000,00
	BELANJA PERJALANAN DINAS	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.095.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.809.000,00
	BELANJA PEMELIHARAAN	
	Belanja Pemeliharaan Jaringan	1.902.500,00
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	55.376.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat	225.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan	10.904.000,00
	Pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga	9.117.000,00
	PELAYANAN PUBLIK	

	Honorarium/ Upah	5.160.000,00
	Uang lembur	10.707.500,00
	BELANJA BARANG DAN JASA	
	Biaya bahan pakai habis kantor	117.157.500,00
	Biaya cetak dan penggandaan	158.439.900,00
	Biaya makanan dan minuman	87.940.000,00
	BELANJA PERJALANAN DINAS	
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.753.800,00
	BELANJA PEMELIHARAAN	
	Belanja pemeliharaan alat kantor & rumah tangga	34.808.000,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN KPPD KOTA	1.186.008.925,00

	BELANJA OPERASI & PEMELIHARAAN	
	Uang sidang/ rapat	1.990.500,00
	Honorarium/ Upah	7.270.000,00
	Uang lembur	9.297.500,00
	BELANJA BARANG DAN JASA	
	Biaya bahan pakai habis kantor	69.971.000,00
	Biaya cetak dan penggandaan	171.153.150,00
	Biaya makanan dan minuman	76.740.000,00
	BELANJA PERJALANAN DINAS	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.110.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.369.600,00
	BELANJA PEMELIHARAAN	
	Belanja pemeliharaan alat kantor& rumah tangga	24.500.000,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN KPPD BANTUL	987.651.743,00

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD Sleman	
	Keterangan	Jumlah
2005	APARATUR DAERAH	
	BELANJA ADMINISTRASI UMUM	
	BELANJA PEGAWAI/ PERSONALIA	
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	440.479.833,00
	Tunjangan tambahan penghasilan	10.980.000,00
	Uang sidang/ rapat	832.500,00
	BELANJA BARANG DAN JASA	
	Biaya jasa pihak ketiga	37.335.000,00
	Biaya bahan pakai habis kantor	47.263.350,00
	Biaya jasa kantor	79.471.495,00
	Biaya cetak dan penggandaan	70.256.025,00
	Biaya makanan dan minuman	575.000,00
	BELANJA PERJALANAN DINAS	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.362.500,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.644.800,00
	BELANJA PEMELIHARAAN	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	48.301.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan	11.140.000,00
	Pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga	12.813.975,00
	PELAYANAN PUBLIK	
	BELANJA OPERASI & PEMELIHARAAN	
	Uang sidang/ rapat	2.476.500,00
	Honorarium/ Upah	6.000.000,00
	Uang lembur	12.597.500,00
	BELANJA BARANG DAN JASA	

Tahun	KPPD Gunung Kidul	
	Keterangan	Jumlah
2005	APARATUR DAERAH	
	BELANJA ADMINISTRASI UMUM	
	BELANJA PEGAWAI/ PERSONALIA	
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	217.549.334,00
	Tunjangan tambahan penghasilan	6.300.000,00
	BELANJA BARANG DAN JASA	
	Biaya jasa pihak ketiga	13.000.000,00
	Biaya bahan pakai habis kantor	11.528.100,00
	Biaya jasa kantor	57.505.643,00
	Biaya cetak dan penggandaan	5.842.500,00
	BELANJA PERJALANAN DINAS	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	365.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.484.000,00
	BELANJA PEMELIHARAAN	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	47.301.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan	12.884.600,00
	Pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga	1.282.000,00
	PELAYANAN PUBLIK	
	BELANJA OPERASI & PEMELIHARAAN	
	Uang sidang/ rapat	1.185.000,00
	Honorarium/ Upah	3.300.000,00
	Uang lembur	1.542.500,00
	BELANJA BARANG DAN JASA	
	Biaya bahan pakai habis kantor	40.937.000,00
	Biaya cetak dan penggandaan	62.890.000,00

	Biaya jasa pihak ketiga	1.000.000,00
	Biaya bahan pakai habis kantor	137.145.500,00
	Biaya cetak dan penggandaan	217.502.750,00
	Biaya makanan dan minuman	85.189.000,00
	BELANJA PERJALANAN DINAS	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.435.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.055.000,00
	BELANJA PEMELIHARAAN	
	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga	30.696.000,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN KPPD SLEMAN	1.278.552.728,00

	Biaya makanan dan minuman	38.705.000,00
	BELANJA PERJALANAN DINAS	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.585.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.069.600,00
	BELANJA PEMELIHARAAN	
	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga	24.900.000,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN KPPD GUNUNG KIDUL	567.156.277,00

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD Kulon Progo	
	Keterangan	Jumlah
2005	APARATUR DAERAH	
	BELANJA ADMINISTRASI UMUM	
	BELANJA PEGAWAI/ PERSONALIA	
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	230.033.553,00
	Tunjangan tambahan penghasilan	5.475.000,00
	Uang sidang/ rapat	81.000,00
	BELANJA BARANG DAN JASA	
	Biaya jasa pihak ketiga	27.000.000,00
	Biaya bahan pakai habis kantor	1.636.750,00
	Biaya jasa kantor	56.999.893,00
	Biaya cetak dan penggandaan	1.947.200,00
	Biaya makanan dan minuman	55.000,00
	BELANJA PERJALANAN DINAS	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	720.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.863.600,00
	BELANJA PEMELIHARAAN	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	24.899.380,00
	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan	22.194.720,00
	Pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga	6.579.550,00
	PELAYANAN PUBLIK	
	BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
	Uang sidang/ rapat	621.000,00
	Honorarium/ Upah	4.560.000,00
	Uang lembur	2.025.000,00
	BELANJA BARANG DAN JASA	

	Biaya bahan pakai habis kantor	55.263.950,00
	Biaya cetak dan penggandaan	58.016.925,00
	Biaya makanan dan minuman	40.182.000,00
	BELANJA PERJALANAN DINAS	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.115.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.527.800,00
	BELANJA PEMELIHARAAN	
	Belanja pemeliharaan alat kantor dan RT	24.650.000,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN	590.447.321,00
	KPPD KULON PROGO	

Sumber: Data primer diolah

Lampiran III: Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2006

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
 Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD DI Kota	
	Keterangan	Jumlah
2006	APARATUR DAERAH	
	Belanja Administrasi Umum	
	Belanja Pegawai/ Personalia	500.155.346,00
	Belanja Barang dan Jasa	187.576.392,00
	Belanja Perjalanan Dinas	29.920.000,00
	Belanja Pemeliharaan	152.099.600,00
	PELAYANAN PUBLIK	
	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	
	Belanja Pegawai/ Personalia	36.342.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	490.436.200,00
	Belanja Perjalanan Dinas	19.472.800,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN	1.416.002.338,00

Tahun	KPPD Bantul	
	Keterangan	Jumlah
2006	APARATUR DAERAH	
	Belanja Administrasi Umum	
	Belanja Pegawai/ Personalia	499.649.842,00
	Belanja Barang dan Jasa	142.272.512,00
	Belanja Perjalanan Dinas	32.105.000,00
	Belanja Pemeliharaan	273.468.500,00
	PELAYANAN PUBLIK	
	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	
	Belanja Pegawai/ Personalia	29.765.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	412.139.950,00
	Belanja Perjalanan Dinas	22.798.900,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN	1.412.199.704,00

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD Kulon Progo	Jumlah
	Keterangan	
2006	APARATUR DAERAH	
	Belanja Administrasi Umum	
	Belanja Pegawai/ Personalia	311.894.384,00
	Belanja Barang dan Jasa	81.411.143,00
	Belanja Perjalanan Dinas	30.620.000,00
	Belanja Pemeliharaan	106.373.771,00
	PELAYANAN PUBLIK	
	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	
	Belanja Pegawai/ Personalia	16.355.010,00
	Belanja Barang dan Jasa	223.957.195,00
	Belanja Perjalanan Dinas	25.951.400,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN	796.562.903,00

Tahun	KPPD Gunung Kidul	Jumlah
	Keterangan	
2006	APARATUR DAERAH	
	Belanja Administrasi Umum	
	Belanja Pegawai/ Personalia	272.861.887,00
	Belanja Barang dan Jasa	88.084.405,00
	Belanja Perjalanan Dinas	28.710.000,00
	Belanja Pemeliharaan	114.073.900,00
	PELAYANAN PUBLIK	
	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	
	Belanja Pegawai/ Personalia	12.126.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	230.368.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	27.970.000,00
	Belanja Pemeliharaan	31.600.000,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN	774.194.192,00

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD Sleman	Jumlah
	Keterangan	
2006	APARATUR DAERAH	
	Belanja Administrasi Umum	
	Belanja Pegawai/ Personalia	598.280.837,00
	Belanja Barang dan Jasa	291.653.908,00
	Belanja Perjalanan Dinas	32.180.000,00
	Belanja Pemeliharaan	145.318.696,00
	PELAYANAN PUBLIK	
	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	
	Belanja Pegawai/ Personalia	35.590.500,00
	Belanja Barang dan Jasa	571.611.525,00
	Belanja Perjalanan Dinas	31.530.000,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN	1.706.165.466,00

Sumber: Data primer diolah

Lampiran IV: Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2007

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD DI Kota	
	Keterangan	Jumlah
2007	BELANJA PEGAWAI	
	Gaji dan Tunjangan	
	Gaji Pokok PNS/ Uang Prestasi	439.755.400,00
	Tunjangan Keluarga	36.804.662,00
	Tunjangan Jabatan	48.765.000,00
	Tunjangan Fungsional Umum	44.710.000,00
	Tunjangan Beras	28.936.960,00
	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	7.540.152,00
	Pembulatan Gaji	13.760,00
	BELANJA LANGSUNG	
	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	
	Belanja Perangko, meterai dan benda pos lainnya	1.170.000,00
	Belanja Telepon	3.286.395,00
	Belanja Air	897.250,00
	Belanja Listrik	81.442.925,00
	Belanja Kawat/ faksimili/ internet	0,00
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	
	Honorarium Pengelola Keuangan	24.290.000,00
	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	
	Belanja Jasa Pihak Ketiga	48.096.000,00
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	
	Belanja Alat Tulis Kantor	45.465.900,00
	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	

	Belanja Cetak	13.279.400,00
	Belanja Penggandaan	3.244.600,00
	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK	
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	0,00
	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	415.421,00
	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Belanja Surat Kabar/ Majalah	3.768.000,00
	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	
	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	749.000,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	1.687.500,00
	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	390.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.950.000,00
	PENGADAAN MEUBELAIR	
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	420.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	11.235.000,00
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	95.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	
	Belanja Pengisian tabung Pemadam Kebakaran	871.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	48.450.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor	18.472.500,00
	REHABILITASI SEDANG/ BERAT GEDUNG KANTOR	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	91.800.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00
	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Belanja Publikasi	4.800.000,00
	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI	

	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.140.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	400.000,00
	Belanja Penggandaan	2.122.500,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	1.170.000,00
	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	19.920.000,00
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.434.000,00
	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	35.600.000,00
	Uang Lembur Harian	11.150.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	66.090.350,00
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	104.998.950,00
	Belanja Cetakan	206.884.000,00
	Belanja Penggandaan	6.114.700,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	1.492.500,00
	Belanja makanan dan minuman harian	130.500.000,00
	Belanja makanan dan minuman umum	364.000,00
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.270.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.494.300,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN DI KPPD KOTA	1.692.947.125,00

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD Bantul	
	Keterangan	Jumlah
2007	BELANJA PEGAWAI	
	Gaji dan Tunjangan	
	Gaji Pokok PNS/ Uang Prestasi	419.736.000,00
	Tunjangan Keluarga	40.277.628,00
	Tunjangan Jabatan	39.055.000,00
	Tunjangan Fungsional Umum	37.740.000,00
	Tunjangan Beras	26.859.040,00
	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	8.779.867,00
	Pembulatan Gaji	13.492,00
	BELANJA LANGSUNG	
	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	
	Belanja Perangko, meterai dan benda pos lainnya	600.000,00
	Belanja Telepon	6.430.846,00
	Belanja Air	1.247.250,00
	Belanja Listrik	45.675.480,00
	Belanja Kawat/ faksimili/ internet	9.048.000,00
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	
	Honorarium Pengelola Keuangan	17.815.000,00
	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	
	Belanja Jasa Pihak Ketiga	30.840.000,00
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	
	Belanja Alat Tulis Kantor	11.553.250,00
	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	
	Belanja Cetak	9.270.000,00
	Belanja Penggandaan	996.600,00

	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK	
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.000.000,00
	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Belanja Surat Kabar/ Majalah	2.730.000,00
	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	
	Belanja makanan dan minuman rapat	4.995.000,00
	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.330.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.005.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan	4.820.000,00
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	8.311.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	485.000,00
	Belanja Dokumen/ Administrasi Tender	393.900,00
	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang	980.000,00
	Belanja Penggandaan	680.000,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.730.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR	
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	2.189.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Jasa Service	1.532.000,00
	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.757.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	11.220.000,00
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	94.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	
	Belanja Pengisian tabung Pemadam Kebakaran	1.713.000,00
	Belanja Pemeliharaan Perabot Kantor	4.940.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	29.750.000,00

	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor	7.284.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13.000.000,00
	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Belanja Publikasi	8.500.000,00
	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	19.380.000,00
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	3.225.500,00
	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	35.600.000,00
	Uang Lembur Harian	6.250.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	47.322.000,00
	Belanja Peranko, Meterai dan benda pos lainnya	44.710.650,00
	Belanja Cetakan	206.355.000,00
	Belanja Penggandaan	1.059.200,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	4.350.000,00
	Belanja makanan dan minuman harian	111.440.000,00
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.850.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.121.200,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN DI KPPD BANTUL	1.370.789.903,00

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD Sleman	Jumlah
	Keterangan	
2007	BELANJA PEGAWAI	
	Gaji dan Tunjangan	
	Gaji Pokok PNS/ Uang Prestasi	558.345.800,00
	Tunjangan Keluarga	57.898.380,00
	Tunjangan Jabatan	53.910.000,00
	Tunjangan Fungsional Umum	54.390.000,00
	Tunjangan Beras	39.865.280,00
	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	10.837.468,00
	Pembulatan Gaji	18.247,00
	BELANJA LANGSUNG	
	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	
	Belanja Perangko, meterai dan benda pos lainnya	1.500.000,00
	Belanja Telepon	12.442.257,00
	Belanja Air	0,00
	Belanja Listrik	51.600.000,00
	Belanja Kawat/ faksimili/ internet	9.000.000,00
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	
	Honorarium Pengelola Keuangan	25.530.000,00
	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	
	Belanja Jasa Pihak Ketiga	37.562.400,00
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	
	Belanja Alat Tulis Kantor	18.450.000,00
	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	
	Belanja Cetak	16.942.300,00
	Belanja Penggandaan	5.655.700,00

	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK	
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.300.000,00
	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Belanja Surat Kabar/ Majalah	3.879.580,00
	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	
	Belanja makanan dan minuman rapat	5.812.500,00
	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.020.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.090.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan	2.329.000,00
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	8.311.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	485.600,00
	Belanja Dokumen/ Administrasi Tender	393.900,00
	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang	1.000.000,00
	Belanja Penggandaan	687.000,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.340.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR	
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.019.000,00
	Belanja bahan Baku Bangunan	78.412.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.264.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	11.840.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	
	Belanja Pengisian tabung Pemadam Kebakaran	1.750.000,00
	Jasa Pemeliharaan Perlangkapan Kantor	3.834.500,00
	Belanja Pemeliharaan Perabot Kantor	5.000.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	46.400.000,00

	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor	10.937.683,00
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	970.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00
	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	800.000,00
	Belanja Penggandaan	3.250.000,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	3.150.000,00
	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	6.939.000,00
	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	35.600.000,00
	Uang Lembur Harian	13.440.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	222.303.500,00
	Belanja Peranko, Meterai dan benda pos lainnya	63.543.150,00
	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang	2.600.000,00
	Belanja Cetakan	365.685.000,00
	Belanja Penggandaan	8.121.100,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00
	Belanja makanan dan minuman harian	150.179.000,00
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.810.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.848.500,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN DI KPPD SLEMAN	2.177.642.845,00

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD Gunung Kidul	Jumlah
	Keterangan	
2007	BELANJA PEGAWAI	
	Gaji dan Tunjangan	
	Gaji Pokok PNS/ Uang Prestasi	245.071.900,00
	Tunjangan Keluarga	24.417.204,00
	Tunjangan Jabatan	37.440.000,00
	Tunjangan Fungsional Umum	20.470.000,00
	Tunjangan Beras	16.948.960,00
	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	5.189.902,00
	Pembulatan Gaji	8.999,00
	BELANJA LANGSUNG	
	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	
	Belanja Perangko, meterai dan benda pos lainnya	600.000,00
	Belanja Telepon	2.749.311,00
	Belanja Air	836.700,00
	Belanja Listrik	17.615.280,00
	Belanja Kawat/ faksimili/ internet	0,00
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	
	Honorarium Pengelola Keuangan	14.310.000,00
	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	
	Belanja Jasa Pihak Ketiga	41.791.000,00
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	
	Belanja Alat Tulis Kantor	6.785.300,00
	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	
	Belanja Cetak	7.457.600,00
	Belanja Penggandaan	1.333.000,00

	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK	
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2.592.000,00
	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Belanja Surat Kabar/ Majalah	2.592.000,00
	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	
	Belanja makanan dan minuman rapat	0
	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	140.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	49.660.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR	
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.170.000,00
	Belanja bahan Baku Bangunan	15.000.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.675.500,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	9.047.200,00
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	187.000,00
	Belanja Pemeliharaan Perabot Kantor	4.500.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	34.500.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor	5.590.000,00
	REHABILITASI SEDANG/ BERAT GEDUNG KANTOR	
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	7.111.600,00
	REHABILITASI SEDANG/ BERAT GEDUNG KANTOR	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00
	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Belanja Cetak	4.500.000,00
	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.590.000,00
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.803.000,00
	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	35.600.000,00

	Uang Lembur Harian	2.580.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	69.934.250,00
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	27.000.000,00
	Belanja Cetak	92.100.000,00
	Belanja Penggandaan	2.799.600,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	1.252.500,00
	Belanja makanan dan minuman harian	59.690.000,00
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.660.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.417.000,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN DI KPPD GUNUNG KIDUL	926.716.806,00

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD Kulon Progo	Jumlah
	Keterangan	
2007	BELANJA PEGAWAI	
	Gaji dan Tunjangan	
	Gaji Pokok PNS/ Uang Prestasi	270.707.200,00
	Tunjangan Keluarga	24.719.190,00
	Tunjangan Jabatan	41.940.000,00
	Tunjangan Fungsional Umum	19.175.000,00
	Tunjangan Beras	16.738.800,00
	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	6.223.024,00
	Pembulatan Gaji	7.197,00
	BELANJA LANGSUNG	
	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	
	Belanja Perangko, meterai dan benda pos lainnya	555.000,00
	Belanja Telepon	2.250.467,00
	Belanja Air	2.162.750,00
	Belanja Listrik	23.878.800,00
	Belanja Kawat/ faksimili/ internet	9.048.000,00
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	
	Honorarium Pengelola Keuangan	13.980.000,00
	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	
	Belanja Jasa Pihak Ketiga	27.850.000,00
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	
	Belanja Alat Tulis Kantor	6.744.000,00
	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	
	Belanja Cetak	5.850.000,00
	Belanja Penggandaan	1.519.625,00

	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK	
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.962.000,00
	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	432.000,00
	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.000.000,00
	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Belanja Surat Kabar/ Majalah	3.110.000,00
	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	
	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.188.000,00
	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	
	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00
	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.260.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.480.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Jasa Service	3.397.700,00
	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.369.099,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	11.555.000,00
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	22.000,00
	Belanja Pemeliharaan Perabot Kantor	2.850.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	34.500.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor	5.590.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00
	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Belanja Cetak	4.960.000,00
	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.720.000,00
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.726.000,00
	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	35.600.000,00

	Uang Lembur Harian	5.436.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	40.136.250,00
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	35.775.000,00
	Belanja Cetakan	90.996.500,00
	Belanja Penggandaan	1.111.700,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	1.927.500,00
	Belanja makanan dan minuman harian	65.170.000,00
	Belanja makanan dan minuman umum	540.000,00
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.400.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.466.200,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN DI KPPD KULON PROGO	929.470.002,00

Sumber: Data primer diolah

Lampiran V: Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2008

**Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Tahun	KPPD DI Kota	
	Keterangan	Jumlah
2008	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	1.200.000,00
2008	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	
	Belanja Telepon	2.023.018,00
	Belanja Air	372.000,00
2008	Belanja Listrik	28.550.745,00
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	117.000,00
2008	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	
	Honorarium Pengelola Keuangan	30.780.000,00
2008	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	48.096.000,00
2008	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	
	Belanja Alat Tulis Kantor	15.822.400,00
2008	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	
	Belanja Cetakan	12.175.000,00
	Belanja Penggandaan	5.139.370,00
2008	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN KANTOR	
	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery)	6.005.800,00
2008	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.146.270,00
2008	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Belanja Surat Kabar/ Majalah	4.151.500,00

	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	
	Belanja makanan dan minuman rapat	804.000,00
	Belanja makanan dan minuman tamu	3.112.500,00
	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.130.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.450.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	39.350.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.635.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	12.099.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	
	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	2.135.000,00
	Belanja alat-alat kantor	18.913.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum	1.500.000,00
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik	9.825.000,00
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	49.000.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ARSIP SURAT KENDARAAN BERMOTOR	
	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	22.000.000,00
	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Belanja Publikasi	4.980.000,00
	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	25.870.000,00
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00
	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	15.210.000,00
	Uang Lembur PNS	23.470.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	84.085.500,00
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	101.250.000,00
	Belanja Cetakan	327.297.500,00

	Belanja Peggandaan	8.573.655,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	2.295.000,00
	Belanja makanan dan minuman harian	154.800.000,00
	Belanja makanan dan minuman umum	5.842.000,00
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.700.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.025.500,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN DI KPPD KOTA	1.150.431.758,00

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD Bantul	Jumlah
	Keterangan	
2008	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	495.000,00
	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	
	Belanja Telepon	5.880.601,00
	Belanja Air	1.914.500,00
	Belanja Listrik	76.285.065,00
	Belanja kawat/ faksimili/ internet	9.048.000,00
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	343.000,00
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	
	Honorarium Pengelola Keuangan	26.800.000,00
	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	45.331.500,00
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	
	Belanja Alat Tulis Kantor	24.412.750,00
	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	
	Belanja Cetakan	11.640.000,00
	Belanja Penggandaan	1.475.000,00
	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN KANTOR	
	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery)	8.697.200,00
	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Belanja Surat Kabar/ Majalah	3.756.500,00
	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	
	Belanja makanan dan minuman rapat	4.545.000,00
	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	

	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.970.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.990.000,00
	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	
	Honorarium Panitia Pengadaan	3.762.750,00
	Alat tulis kantor	270.000,00
	Belanja Jasa Pengumuman Lelang	3.120.000,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	420.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.960.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	24.858.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Jasa Service	2.277.500,00
	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.365.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	22.540.750,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	
	Belanja pengisian tabung gas	1.365.000,00
	Belanja alat-alat kantor	350.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik	8.660.000,00
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	34.000.000,00
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Telepon	300.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ARSIP SURAT KENDARAAN BERMOTOR	
	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	45.000.000,00
	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Belanja Publikasi	5.700.000,00
	Belanja Cetak	4.000.000,00
	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	5.750.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	510.000,00

	Belanja Alat-alat perlengkapan	1.875.000,00
	Belanja Publikasi	175.000,00
	Belanja Penggandaan	300.000,00
	Belanja makanan dan minuman harian umum	5.250.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	26.790.000,00
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.125.000,00
	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	7.605.000,00
	Uang Lembur PNS	16.606.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	84.601.000,00
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	38.136.150,00
	Belanja Cetakan	270.890.000,00
	Belanja Penggandaan	2.034.900,00
	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	141.100.000,00
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.200.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.936.500,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN DI KPPD BANTUL	1.085.867.666,00

Ringkasan Biaya Pemungutan Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD Sleman	
	Keterangan	Jumlah
2008	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	1.620.000,00
	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	
	Belanja Telepon	6.321.238,00
	Belanja Listrik	57.515.880,00
	Belanja kawat/ faksimili/ internet	9.048.000,00
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	95.000,00
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	
	Honorarium Pengelola Keuangan	35.480.000,00
	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	44.750.500,00
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	
	Belanja Alat Tulis Kantor	27.469.825,00
	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	
	Belanja Cetakan	30.400.000,00
	Belanja Penggandaan	1.150.000,00
	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN KANTOR	
	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery)	10.800.000,00
	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Belanja Surat Kabar/ Majalah	
	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	
	Belanja makanan dan minuman rapat	9.900.000,00
	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.120.000,00

	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.940.000,00
	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	4.586.950,00
	Belanja Jasa Pengumuman Lelang	3.275.870,00
	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	
	Honorarium Panitia Pengadaan	2.097.500,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.065.000,00
	Belanja Bahan Baku Bangunan	77.850.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Jasa Service	4.890.900,00
	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.052.500,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	14.321.500,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	
	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	1.750.000,00
	Belanja alat-alat kantor	5.416.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	26.880,00
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	48.800.000,00
	Belanja pemeliharaan alat kantor	31.320.700,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ARSIP SURAT KENDARAAN BERMOTOR	
	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	40.500.000,00
	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Honorarium Tenaga Berdasarkan Beban Kerja	625.000,00
	Honorarium Harian	1.000.000,00
	Belanja Penggandaan	1.500.000,00
	Belanja Makan dan Minum Tamu	2.275.000,00
	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Honorarium Tenaga Berdasarkan Beban Kerja	7.980.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.000.000,00

	Belanja Peggandaan	1.495.000,00
	Belanja makanan dan minuman tamu	2.025.000,00
	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.520.000,00
	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	15.210.000,00
	Uang Lembur PNS	34.556.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	350.684.000,00
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	72.511.850,00
	Belanja Jasa Pengumuman Lelang	8.365.752,00
	Belanja Cetakan	626.630.000,00
	Belanja Peggandaan	9.200.000,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	6.367.500,00
	Belanja makanan dan minuman harian	190.980.000,00
	Belanja makanan dan minuman umum	4.800.000,00
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.040.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.147.100,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN DI KPPD SLEMAN	1.954.476.445,00

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD Gunung Kidul	
	Keterangan	Jumlah
2008	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	660.000,00
	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	
	Belanja Telepon	2.380.840,00
	Belanja Air	1.823.900,00
	Belanja Listrik	28.521.730,00
	Belanja kawat/ faksimili/ internet	8.294.000,00
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	248.000,00
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	
	Honorarium Pengelola Keuangan	19.725.000,00
	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	45.500.000,00
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	
	Belanja Alat Tulis Kantor	9.365.900,00
	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	
	Belanja Cetakan	5.933.000,00
	Belanja Penggandaan	1.616.000,00
	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN KANTOR	
	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery)	2.273.800,00
	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	
	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	1.050.000,00
	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Belanja Surat Kabar/ Majalah	3.297.500,00
	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	

	Belanja makanan dan minuman rapat	300.000,00
	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.070.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.110.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	38.000.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Jasa Service	5.960.500,00
	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.562.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	12.835.700,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	
	Belanja alat-alat kantor	31.783.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ARSIP SURAT KENDARAAN BERMOTOR	
	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	13.200.000,00
	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Belanja Publikasi	3.000.000,00
	Belanja Cetak	1.750.000,00
	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	17.280.000,00
	Uang Lembur PNS	11.726.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	58.544.000,00
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	34.500.000,00
	Belanja Cetakan	100.038.000,00
	Belanja Penggandaan	4.499.000,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00
	Belanja makanan dan minuman harian	88.430.000,00

	Belanja makanan dan minuman umum	3.456.000,00
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.130.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.811.800,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN DI KPPD GUNUNG KIDUL	649.075.670,00

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD Kulon Progo	
	Keterangan	Jumlah
2008	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	600.000,00
	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	
	Belanja Telepon	1.761.387,00
	Belanja Air	2.384.000,00
	Belanja Listrik	25.866.000,00
	Belanja kawat/ faksimili/ internet	9.048.000,00
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	542.000,00
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	
	Honorarium Pengelola Keuangan	17.175.000,00
	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	27.900.000,00
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	
	Belanja Alat Tulis Kantor	14.922.200,00
	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	
	Belanja Cetakan	11.470.000,00
	Belanja Penggandaan	2.931.670,00
	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN KANTOR	
	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery)	260.000,00
	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Belanja Surat Kabar/ Majalah	3.613.000,00
	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	
	Belanja makanan dan minuman rapat	930.000,00
	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	

	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.800.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46.200.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Jasa Service	2.900.500,00
	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.579.600,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	13.901.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	
	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	740.000,00
	Belanja alat-alat kantor	8.085.200,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	63.500.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor	1.095.000,00
	Belanja pemeliharaan jaringan komputer	38.000.000,00
	Belanja pemeliharaan alat kantor	1.725.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ARSIP SURAT KENDARAAN BERMOTOR	
	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	10.000.000,00
	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Belanja Publikasi	6.000.000,00
	Belanja Cetak	3.900.000,00
	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16.920.000,00
	Uang Lembur PNS	9.234.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	42.956.000,00
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	48.246.300,00
	Belanja Cetakan	106.830.000,00
	Belanja Penggandaan	1.562.700,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	300.000,00
	Belanja makanan dan minuman harian	79.150.000,00
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.730.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.046.800,00

	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN DI KPPD KULON PROGO	668.805.357,00
--	---	-----------------------

Sumber: Data primer diolah

Lampiran VI: Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2009

**Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Tahun	KPPD DI Kota	
	Keterangan	Jumlah
2009	GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI	
	Gaji Pokok PNS/ Uang Presentasi	784.395.440,00
	Tunjangan Keluarga	62.153.475,00
	Tunjangan Jabatan	43.380.000,00
	Tunjangan Fungsional Umum	58.215.000,00
	Tunjangan Beras	40.904.100,00
	Tunjangan PPH/ Tunjangan Khusus	16.623.016,00
	Pembulatan Gaji	19.918,00
	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	1.320.000,00
	Belanja Paket/ Pengiriman	31.500,00
	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	
	Belanja Telepon	1.999.069,00
	Belanja Air	
	Belanja Listrik	
	Belanja kawat/ faksimili/ internet	0,00
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	213.000,00
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	
	Honorarium Pengelola Keuangan	32.280.000,00
	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	
	Belanja Jasa Kantor	41.600.000,00
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	

Belanja Alat Tulis Kantor	32.040.000,00
PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	
Belanja Cetakan	27.366.000,00
Belanja Penggandaan	6.250.000,00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN KANTOR	
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery)	3.552.000,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Belanja Surat Kabar/ Majalah	3.747.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	
Belanja makanan dan minuman harian	1.152.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat	3.528.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.250.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	46.270.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR	
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.310.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
Belanja Jasa Service	0,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	6.625.500,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	14.551.350,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	986.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum	1.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik	49.730.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	480.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga	6.950.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ARSIP SURAT KENDARAAN BERMOTOR	
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	24.200.000,00
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	

Belanja Publikasi	5.000.000,00
INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	26.810.000,00
Honorarium Pegawai Tidak Tetap	14.700.000,00
Uang Lembur PNS	23.614.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor	101.526.250,00
Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	112.499.500,00
Belanja Jasa Pengumuman Lelang	1.599.750,00
Belanja Cetak	55.911.420,00
Belanja Penggandaan	8.562.500,00
Belanja makanan dan minuman harian pegawai	156.290.000,00
Belanja makanan dan minuman umum	3.272.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat	4.952.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.880.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.791.100,00
TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN DI KPPD KOTA	1.857.030.888,00

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD Bantul	
	Keterangan	Jumlah
2009	GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI	
	Gaji Pokok PNS/ Uang Presentasi	745.603.803,00
	Tunjangan Keluarga	79.158.349,00
	Tunjangan Jabatan	37.458.156,00
	Tunjangan Fungsional Umum	54.325.000,00
	Tunjangan Beras	42.638.400,00
	Tunjangan PPH/ Tunjangan Khusus	17.360.612,00
	Pembulatan Gaji	16.117,00
	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	750.000,00
	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	
	Belanja Telepon	6.932.688,00
	Belanja Air	
	Belanja Listrik	
	Belanja kawat/ faksimili/ internet	9.048.000,00
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	356.000,00
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	
	Honorarium Pengelola Keuangan	28.280.000,00
	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	
	Belanja Jasa Kantor	46.683.600,00
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	
	Belanja Alat Tulis Kantor	30.655.400,00
	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	
	Belanja Cetak	15.366.000,00

Belanja Penggandaan	1.375.000,00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN KANTOR	
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery)	9.345.500,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Belanja Surat Kabar/ Majalah	3.864.500,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	
Belanja makanan dan minuman rapat	7.872.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.460.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.100.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR	
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	18.552.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
Belanja Jasa Service	3.267.500,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	4.034.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	23.192.500,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	1.371.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	18.420.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat kantor	29.525.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ARSIP SURAT KENDARAAN BERMOTOR	
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	50.000.000,00
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Honorarium Tenaga Ahli	900.000,00
Belanja Publikasi	2.350.000,00
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	7.200.000,00
Belanja Alat-alat/Peralatan	3.304.000,00

	Belanja Dokumentasi	170.000,00
	Belanja Spanduk	200.000,00
	Belanja Cetak	0,00
	Belanja Penggandaan	255.625,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	128.000,00
	Belanja makanan dan minuman umum	8.400.000,00
	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	29.100.000,00
	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	9.100.000,00
	Uang Lembur PNS	9.072.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	57.255.000,00
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	47.310.750,00
	Belanja Jasa Pengumuman Lelang	1.481.250,00
	Belanja Cetak	28.100.000,00
	Belanja Penggandaan	2.523.750,00
	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	137.000.000,00
	Belanja makanan dan minuman umum	2.400.000,00
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.800.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.643.800,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN DI KPPD BANTUL	1.703.705.300,00

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD Sleman	
	Keterangan	Jumlah
2009	GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI	
	Gaji Pokok PNS/ Uang Presentasi	973.768.300,00
	Tunjangan Keluarga	90.365.384,00
	Tunjangan Jabatan	41.760.000,00
	Tunjangan Fungsional Umum	78.975.000,00
	Tunjangan Beras	51.732.900,00
	Tunjangan PPH/ Tunjangan Khusus	21.459.663,00
	Pembulatan Gaji	25.402,00
	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	1.800.000,00
	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	
	Belanja Telepon	8.092.919,00
	Belanja Air	
	Belanja Listrik	
	Belanja kawat/ faksimili/ internet	9.048.000,00
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	117.000,00
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	
	Honorarium Pengelola Keuangan	36.180.000,00
	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	11.595.500,00
	Belanja Bahan/ Material	10.000.000,00
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	
	Belanja Alat Tulis Kantor	35.486.350,00
	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	

Belanja Cetakan	40.820.000,00
Belanja Penggandaan	1.150.000,00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN KANTOR	
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery)	13.860.000,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Belanja Surat Kabar/ Majalah	6.318.500,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	
Belanja makanan dan minuman rapat	9.562.500,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.100.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.030.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR	
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	12.225.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
Belanja Jasa Service	2.900.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	4.175.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	16.771.500,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	3.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	8.570.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	49.300.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	63.249.500,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ARSIP SURAT KENDARAAN BERMOTOR	
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	52.000.000,00
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Honorarium Penyelenggara Kegiatan	625.000,00
Honorarium Harian	1.000.000,00
Belanja Cetak	1.500.000,00
Belanj Makan dan Minuman Tamu	2.275.000,00

	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	7.980.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli	2.000.000,00
	Belanja Cetak	3.000.000,00
	Belanja Penggandaan	577.500,00
	Belanja makanan dan minuman umum	2.880.000,00
	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.520.000,00
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	3.190.000,00
	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	18.200.000,00
	Uang Lembur PNS	34.560.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	22.685.500,00
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	110.997.900,00
	Belanja Jasa Pengumuman Lelang	1.540.500,00
	Belanja Lain-lain Jasa Kantor	31.800.000,00
	Belanja Cetak	35.559.820,00
	Belanja Penggandaan	12.610.000,00
	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	191.893.000,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	6.375.000,00
	Belanja makanan dan minuman umum	4.800.000,00
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.990.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.906.000,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN DI KPPD SLEMAN	2.272.903.638,00

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD Gunung Kidul	
	Keterangan	Jumlah
2009	GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI	
	Gaji Pokok PNS/ Uang Presentasi	455.989.830,00
	Tunjangan Keluarga	54.126.555,00
	Tunjangan Jabatan	37.440.000,00
	Tunjangan Fungsional Umum	32.025.000,00
	Tunjangan Beras	28.256.400,00
	Tunjangan PPH/ Tunjangan Khusus	10.171.740,00
	Pembulatan Gaji	13.379,00
	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	660.000,00
	Belanja Paket/ Pengiriman	19.000,00
	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	
	Belanja Telepon	2.589.308,00
	Belanja Air	
	Belanja Listrik	
	Belanja kawat/ faksimili/ internet	9.048.000,00
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	178.000,00
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	
	Honorarium Pengelola Keuangan	22.480.000,00
	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	39.000.000,00
	Belanja Jasa Kantor	
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	
	Belanja Alat Tulis Kantor	10.499.100,00
	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	

Belanja Cetak	5.951.000,00
Belanja Penggandaan	1.888.000,00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN KANTOR	
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery)	3.114.500,00
PENYEDIAAN ALAT RUMAH TANGGA	
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.100.000,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Belanja Surat Kabar/ Majalah	3.420.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	
Belanja makanan dan minuman rapat	2.376.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.040.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.090.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR	
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
Belanja Jasa Service	5.864.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	2.617.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	12.585.500,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	
Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik	39.503.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	13.480.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat kantor	3.900.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ARSIP SURAT KENDARAAN BERMOTOR	
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	13.200.000,00
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Belanja Publikasi	6.000.000,00
Belanja Cetak	1.750.000,00

INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH		
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		17.760.000,00
Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa		472.000,00
Uang Lembur PNS		14.738.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor		21.160.400,00
Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya		0,00
Belanja Cetak		7.118.000,00
Belanja Penggandaan		5.736.000,00
Belanja makanan dan minuman harian pegawai		92.060.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat		3.616.000,00
Belanja makanan dan minuman umum		3.456.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah		21.180.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah		14.873.800,00
TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN DI KPPD GUNUNG KIDUL		1.047.545.512,00

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD Kulon Progo	
	Keterangan	Jumlah
2009	GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI	
	Gaji Pokok PNS/ Uang Presentasi	436.405.380,00
	Tunjangan Keluarga	48.225.542,00
	Tunjangan Jabatan	44.820.000,00
	Tunjangan Fungsional Umum	27.690.000,00
	Tunjangan Beras	26.226.000,00
	Tunjangan PPH/ Tunjangan Khusus	10.297.702,00
	Pembulatan Gaji	8.779,00
	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	645.000,00
	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	
	Belanja Telepon	1.954.616,00
	Belanja Air	
	Belanja Listrik	
	Belanja kawat/ faksimili/ internet	9.048.000,00
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	102.000,00
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	
	Honorarium Pengelola Keuangan	18.430.000,00
	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	
	Belanja Jasa Kantor	18.600.000,00
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	
	Belanja Alat Tulis Kantor	15.586.600,00
	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	
	Belanja Cetak	7.706.000,00

Belanja Penggandaan	444.950,00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN KANTOR	
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery)	1.457.750,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Belanja Surat Kabar/ Majalah	3.688.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	
Belanja makanan dan minuman rapat	1.248.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.570.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.910.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR	
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
Belanja Jasa Service	5.812.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	2.380.500,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	14.872.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	680.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	
Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik	49.450.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	8.246.500,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	224.120,00
Belanja Pemeliharaan Alat kantor	4.327.500,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ARSIP SURAT KENDARAAN BERMOTOR	
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	9.907.000,00
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Belanja Publikasi	8.300.000,00
Belanja Cetak	3.996.000,00
INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.520.000,00
Uang Lembur PNS	11.654.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor	23.838.900,00
Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	48.710.050,00
Belanja Cetak	8.400.000,00
Belanja Penggandaan	1.042.895,00
Belanja makanan dan minuman harian pegawai	83.310.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat	320.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.902.800,00
TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN DI KPPD KULON PROGO	1.026.358.584,00

Sumber: Data primer diolah

Lampiran VII: Persentase Pajak Daerah di Tiap KPPD

**PERSENTASE PAJAK DAERAH DI TIAP KPPD
PROVINSI DI YOGYAKARTA TAHUN 2005 S.D. 2009**

URAIAN	TAHUN 2005		TAHUN 2006		TAHUN 2007	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
	(Rupiah)	(%)	(Rupiah)	(%)	(Rupiah)	(%)
Pajak Kendaraan Bermotor	149.291.828.905,00	41,46	171.146.972.390,00	45,69	199.659.041.270,00	45,91
Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor	154.710.634.950,00	42,96	115.544.048.150,00	30,85	142.987.677.700,00	32,88
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	53.914.945.004,00	14,97	85.805.843.818,00	22,91	89.940.087.066,00	20,68
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT-AP	2.202.254.895,00	0,61	2.081.660.030,00	0,55	2.312.088.105,00	0,53
TOTAL	360.119.663.754,00	100	374.578.524.388,00	100,00	434.898.894.141,00	100,00

URAIAN	TAHUN 2008		TAHUN 2009	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
	(Rupiah)	(%)	(Rupiah)	(%)
Pajak Kendaraan Bermotor	222.136.390.300,00	42,30	252.833.382.945,00	46,72
Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor	190.932.195.150,00	36,36	181.956.963.100,00	33,62
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	109.829.732.718,35	20,91	104.090.628.453,00	19,23
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT-AP	2.287.036.025,00	0,44	2.311.291.271,60	0,43
TOTAL	525.185.354.193,35	100,00	541.192.265.769,60	100,00

Lampiran VIII: Rekapitulasi dan Penentuan Besar Biaya Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Rekapitulasi Pembelanjaan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Provinsi DIY					
Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD)	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
KPPD KOTA	1.186.008.925	1.416.002.338	1.692.947.125	1.150.431.758	1.857.030.888
KPPD BANTUL	987.651.743	1.412.199.704	1.370.789.903	1.085.867.666	1.703.705.300
KPPD SLEMAN	1.278.552.728	1.706.165.466	2.177.642.845	1.954.476.445	2.272.903.638
KPPD GUNUNG KIDUL	567.156.277	774.194.192	926.716.806	649.075.670	1.047.545.512
KPPD KULON PROGO	590.447.321	796.562.903	929.470.002	668.805.357	1.026.358.584
Total Biaya Pemungutan Pajak Daerah di seluruh KPPD Prov. DIY	4.609.816.994	6.105.124.603	7.097.566.681	5.508.656.896	7.907.543.922

Sumber: Data primer diolah

PENENTUAN BESAR BIAYA PEMUNGUTAN			
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PROV. DIY			
Tahun	Jumlah Biaya Pemungutan	Persentase PKB	Biaya Pemungutan
	Pajak Daerah (dalam Rupiah)	(%)	PKB (dalam Rupiah)
	(a)	(b)	(a) x (b)
2005	4.609.816.994,00	41,46	1.911.230.126,00
2006	6.105.124.603,00	45,69	2.789.431.431,00
2007	7.097.566.681,00	45,91	3.258.492.863,00
2008	5.508.656.896,00	42,30	2.330.161.867,00
2009	7.907.543.922,00	46,72	3.694.404.520,00

Sumber: Data primer diolah

Lampiran IX: Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2005 - 2009

KODE REK	URAIAN	TARGET 2005	REALISASI 2005	NAIK/TURUN	%	TARGET 2006	REALISASI 2006
4	PENDAPATAN	665.366.027.225,40	699.579.306.215,18	34.213.278.989,78	5,14	811.602.007.151,72	881.160.029.573,62
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	373.889.939.911,36	401.912.337.894,18	28.022.397.982,82	7,49	368.522.643.044,43	436.497.274.575,62
4 1 1	Pajak Daerah	338.866.932.998,36	360.119.663.754,00	21.252.730.755,64	6,27	327.375.549.000,00	374.578.524.388,00
4 1 1 01	Pajak Kendaraan Bermotor	130.059.012.000,00	149.291.828.905,00	19.232.816.905,00	14,79	138.123.360.000,00	171.146.972.390,00
4 1 1 03	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	164.757.718.700,00	154.710.634.950,00	-10.047.083.750,00	-6,10	103.867.319.000,00	115.544.048.150,00
4 1 1 05	Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor	41.850.202.298,36	53.914.945.004,00	12.064.742.705,64	28,83	83.678.870.000,00	85.805.843.818,00
4 1 1 06	Pajak Pengambilan dan Pemanfatan ABT- AP	2.200.000.000,00	2.202.254.895,00	2.254.895,00	0,10	1.706.000.000,00	2.081.660.030,00
4 1 2	Retribusi Daerah	10.020.178.208,00	11.940.416.429,00	1.920.238.221,00	19,16	11.745.727.282,00	12.454.919.866,00
4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum						
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha						
4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu						
4 1 3	Hasil Perusahaan Milik Daerah	12.358.409.005,00	11.859.586.426,07	-498.822.578,93	-4,04	12.299.634.962,43	11.217.078.313,10
4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	12.644.419.700,00	17.992.671.285,11	5.348.251.585,11	42,30	17.101.731.800,00	38.246.752.008,52
4 2	DANA PERIMBANGAN	271.047.087.314,04	277.237.968.321,00	6.190.881.006,96	2,28	441.562.452.507,29	442.882.531.848,00
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.429.000.000,00	20.429.000.000,00	0,00	0,00	1.516.911.600,00	1.780.223.150,00

NAIK/TURUN	%	TARGET 2007	REALISASI 2007	NAIK/TURUN	%	TARGET 2008	REALISASI 2008	NAIK/TURUN	%
69.558.022.421,90	8,57	911.558.526.278,00	967.870.747.519,50	56.312.221.241,50	6,18	1.161.986.630.223,42	1.258.609.946.423,39	96.623.316.199,97	8,32
67.974.631.531,19	18,45	420.568.426.068,00	480.181.759.199,50	59.613.333.131,50	14,17	547.887.175.315,00	632.872.311.670,13	84.985.136.355,13	15,51
47.202.975.388,00	14,42	378.916.438.850,00	434.898.894.141,00	55.982.455.291,00	14,77	486.168.175.841,00	525.185.354.193,35	39.017.178.352,35	8,03
33.023.612.390,00	23,91	171.324.990.700,00	199.659.041.270,00	28.334.050.570,00	16,54	208.414.628.000,00	222.136.390.300,00	13.721.762.300,00	6,58
11.676.729.150,00	11,24	115.544.692.150,00	142.987.677.700,00	27.442.985.550,00	23,75	169.530.376.000,00	190.932.195.150,00	21.401.819.150,00	12,62
2.126.973.818,00	2,54	90.046.756.000,00	89.940.087.066,00	-106.668.934,00	-0,12	106.023.171.841,00	109.829.732.718,35	3.806.560.877,35	3,59
375.660.030,00	22,02	2.000.000.000,00	2.312.088.105,00	312.088.105,00	15,60	2.200.000.000,00	2.287.036.025,00	87.036.025,00	3,96
709.192.584,00	6,04	14.722.357.478,00	17.563.425.637,00	2.841.068.159,00	19,30	33.144.872.640,00	29.259.898.291,50	-3.884.974.348,50	-11,72
						22.033.176.240,00	17.870.392.661,50	-4.162.783.578,50	-18,89
						8.354.149.900,00	8.577.471.580,00	223.321.680,00	2,67
						2.757.546.500,00	2.812.034.050,00	54.487.550,00	1,98
-1.082.556.649,33	-8,80	12.371.829.740,00	11.927.611.593,02	-444.218.146,98	-3,59	12.768.526.834,00	12.481.050.738,67	-287.476.095,33	-2,25
21.145.020.208,52	123,64	14.557.800.000,00	15.791.827.828,48	1.234.027.828,48	8,48	15.805.600.000,00	65.946.008.446,61	50.140.408.446,61	317,23
1.320.079.340,71	0,30	488.667.515.010,00	480.922.834.904,00	-7.744.680.106,00	-1,58	590.574.676.643,42	602.117.047.488,00	11.542.370.844,58	1,95
263.311.550,00	17,36	2.322.585.200,00	6.766.153.416,00	4.443.568.216,00	191,32	23.524.778.265,00	23.620.587.265,26	95.809.000,26	0,41

TARGET 2009	REALISASI 2009	NAIK/TURUN	%
1.211.298.252.646,00	1.287.308.842.581,57	76.010.589.935,57	6,28
573.593.852.631,00	646.384.918.488,57	72.791.065.857,57	12,69
494.847.565.500,00	546.778.513.889,00	51.930.948.389,00	10,49
232.505.419.000,00	258.279.758.795,00	25.774.339.795,00	11,09
159.698.700.000,00	181.956.118.600,00	22.257.418.600,00	13,94
100.253.869.000,00	104.088.917.953,00	3.835.048.953,00	3,83
2.389.577.500,00	2.453.718.541,00	64.141.041,00	2,68
32.669.306.905,00	34.744.291.180,57	2.074.984.275,57	6,35
21.450.194.435,00	22.615.585.393,57	1.165.390.958,57	5,43
8.495.774.470,00	9.623.648.147,00	1.127.873.677,00	13,28
2.723.338.000,00	2.505.057.640,00	-218.280.360,00	-8,02
19.736.868.047,00	20.094.713.175,00	357.845.128,00	1,81
26.340.112.179,00	44.767.400.244,00	18.427.288.065,00	69,96
630.650.143.805,00	631.013.111.383,00	362.967.578,00	0,06
7.054.256.210,00	9.910.812.710,00	2.856.556.500,00	40,49

Lampiran II: Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2005

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD DI Kota	
	Keterangan	Jumlah
2005	APARATUR DAERAH	
	BELANJA ADMINISTRASI UMUM	
	BELANJA PEGAWAI/ PERSONALIA	
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	403.933.725,00
	Tunjangan tambahan penghasilan	9.000.000,00
	Uang sidang/ rapat	2.167.500,00
	BELANJA BARANG DAN JASA	
	Biaya jasa pihak ketiga	41.400.000,00
	Biaya bahan pakai habis kantor	49.870.700,00
	Biaya jasa kantor	127.706.500,00
	Biaya cetak dan penggandaan	15.575.700,00
	Biaya makanan dan minuman	1.545.000,00
	BELANJA PERJALANAN DINAS	
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.091.000,00
	BELANJA PEMELIHARAAN	
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik	3.925.000,00
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	64.080.100,00
	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan	10.986.500,00
	Pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga	12.153.500,00
	PELAYANAN PUBLIK	
	BELANJA OPERASI & PEMELIHARAAN	
	Uang sidang/ rapat	2.607.000,00

Tahun	KPPD Bantul	
	Keterangan	Jumlah
2005	APARATUR DAERAH	
	BELANJA ADMINISTRASI UMUM	
	BELANJA PEGAWAI/ PERSONALIA	
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	377.700.549,00
	Tunjangan tambahan penghasilan	8.760.000,00
	Uang sidang/ rapat	1.130.000,00
	BELANJA BARANG DAN JASA	
	Biaya jasa pihak ketiga	22.287.200,00
	Biaya bahan pakai habis kantor	13.482.000,00
	Biaya jasa kantor	90.859.594,00
	Biaya cetak dan penggandaan	5.812.150,00
	Biaya makanan dan minuman	790.000,00
	BELANJA PERJALANAN DINAS	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.095.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.809.000,00
	BELANJA PEMELIHARAAN	
	Belanja Pemeliharaan Jaringan	1.902.500,00
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	55.376.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat	225.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan	10.904.000,00
	Pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga	9.117.000,00
	PELAYANAN PUBLIK	

	Honorarium/ Upah	5.160.000,00
	Uang lembur	10.707.500,00
	BELANJA BARANG DAN JASA	
	Biaya bahan pakai habis kantor	117.157.500,00
	Biaya cetak dan penggandaan	158.439.900,00
	Biaya makanan dan minuman	87.940.000,00
	BELANJA PERJALANAN DINAS	
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.753.800,00
	BELANJA PEMELIHARAAN	
	Belanja pemeliharaan alat kantor & rumah tangga	34.808.000,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN KPPD KOTA	1.186.008.925,00

	BELANJA OPERASI & PEMELIHARAAN	
	Uang sidang/ rapat	1.990.500,00
	Honorarium/ Upah	7.270.000,00
	Uang lembur	9.297.500,00
	BELANJA BARANG DAN JASA	
	Biaya bahan pakai habis kantor	69.971.000,00
	Biaya cetak dan penggandaan	171.153.150,00
	Biaya makanan dan minuman	76.740.000,00
	BELANJA PERJALANAN DINAS	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.110.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.369.600,00
	BELANJA PEMELIHARAAN	
	Belanja pemeliharaan alat kantor& rumah tangga	24.500.000,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN KPPD BANTUL	987.651.743,00

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD Sleman	
	Keterangan	Jumlah
2005	APARATUR DAERAH	
	BELANJA ADMINISTRASI UMUM	
	BELANJA PEGAWAI/ PERSONALIA	
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	440.479.833,00
	Tunjangan tambahan penghasilan	10.980.000,00
	Uang sidang/ rapat	832.500,00
	BELANJA BARANG DAN JASA	
	Biaya jasa pihak ketiga	37.335.000,00
	Biaya bahan pakai habis kantor	47.263.350,00
	Biaya jasa kantor	79.471.495,00
	Biaya cetak dan penggandaan	70.256.025,00
	Biaya makanan dan minuman	575.000,00
	BELANJA PERJALANAN DINAS	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.362.500,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.644.800,00
	BELANJA PEMELIHARAAN	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	48.301.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan	11.140.000,00
	Pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga	12.813.975,00
	PELAYANAN PUBLIK	
	BELANJA OPERASI & PEMELIHARAAN	
	Uang sidang/ rapat	2.476.500,00
	Honorarium/ Upah	6.000.000,00
	Uang lembur	12.597.500,00
	BELANJA BARANG DAN JASA	

Tahun	KPPD Gunung Kidul	
	Keterangan	Jumlah
2005	APARATUR DAERAH	
	BELANJA ADMINISTRASI UMUM	
	BELANJA PEGAWAI/ PERSONALIA	
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	217.549.334,00
	Tunjangan tambahan penghasilan	6.300.000,00
	BELANJA BARANG DAN JASA	
	Biaya jasa pihak ketiga	13.000.000,00
	Biaya bahan pakai habis kantor	11.528.100,00
	Biaya jasa kantor	57.505.643,00
	Biaya cetak dan penggandaan	5.842.500,00
	BELANJA PERJALANAN DINAS	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	365.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.484.000,00
	BELANJA PEMELIHARAAN	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	47.301.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan	12.884.600,00
	Pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga	1.282.000,00
	PELAYANAN PUBLIK	
	BELANJA OPERASI & PEMELIHARAAN	
	Uang sidang/ rapat	1.185.000,00
	Honorarium/ Upah	3.300.000,00
	Uang lembur	1.542.500,00
	BELANJA BARANG DAN JASA	
	Biaya bahan pakai habis kantor	40.937.000,00
	Biaya cetak dan penggandaan	62.890.000,00

	Biaya jasa pihak ketiga	1.000.000,00
	Biaya bahan pakai habis kantor	137.145.500,00
	Biaya cetak dan penggandaan	217.502.750,00
	Biaya makanan dan minuman	85.189.000,00
	BELANJA PERJALANAN DINAS	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.435.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.055.000,00
	BELANJA PEMELIHARAAN	
	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga	30.696.000,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN KPPD SLEMAN	1.278.552.728,00

	Biaya makanan dan minuman	38.705.000,00
	BELANJA PERJALANAN DINAS	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.585.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.069.600,00
	BELANJA PEMELIHARAAN	
	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga	24.900.000,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN KPPD GUNUNG KIDUL	567.156.277,00

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD Kulon Progo	
	Keterangan	Jumlah
2005	APARATUR DAERAH	
	BELANJA ADMINISTRASI UMUM	
	BELANJA PEGAWAI/ PERSONALIA	
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	230.033.553,00
	Tunjangan tambahan penghasilan	5.475.000,00
	Uang sidang/ rapat	81.000,00
	BELANJA BARANG DAN JASA	
	Biaya jasa pihak ketiga	27.000.000,00
	Biaya bahan pakai habis kantor	1.636.750,00
	Biaya jasa kantor	56.999.893,00
	Biaya cetak dan penggandaan	1.947.200,00
	Biaya makanan dan minuman	55.000,00
	BELANJA PERJALANAN DINAS	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	720.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.863.600,00
	BELANJA PEMELIHARAAN	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	24.899.380,00
	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan	22.194.720,00
	Pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga	6.579.550,00
	PELAYANAN PUBLIK	
	BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
	Uang sidang/ rapat	621.000,00
	Honorarium/ Upah	4.560.000,00
	Uang lembur	2.025.000,00
	BELANJA BARANG DAN JASA	

	Biaya bahan pakai habis kantor	55.263.950,00
	Biaya cetak dan penggandaan	58.016.925,00
	Biaya makanan dan minuman	40.182.000,00
	BELANJA PERJALANAN DINAS	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.115.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.527.800,00
	BELANJA PEMELIHARAAN	
	Belanja pemeliharaan alat kantor dan RT	24.650.000,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN	590.447.321,00
	KPPD KULON PROGO	

Sumber: Data primer diolah

Lampiran III: Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2006

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
 Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD DI Kota	
	Keterangan	Jumlah
2006	APARATUR DAERAH	
	Belanja Administrasi Umum	
	Belanja Pegawai/ Personalia	500.155.346,00
	Belanja Barang dan Jasa	187.576.392,00
	Belanja Perjalanan Dinas	29.920.000,00
	Belanja Pemeliharaan	152.099.600,00
	PELAYANAN PUBLIK	
	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	
	Belanja Pegawai/ Personalia	36.342.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	490.436.200,00
	Belanja Perjalanan Dinas	19.472.800,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN	1.416.002.338,00

Tahun	KPPD Bantul	
	Keterangan	Jumlah
2006	APARATUR DAERAH	
	Belanja Administrasi Umum	
	Belanja Pegawai/ Personalia	499.649.842,00
	Belanja Barang dan Jasa	142.272.512,00
	Belanja Perjalanan Dinas	32.105.000,00
	Belanja Pemeliharaan	273.468.500,00
	PELAYANAN PUBLIK	
	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	
	Belanja Pegawai/ Personalia	29.765.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	412.139.950,00
	Belanja Perjalanan Dinas	22.798.900,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN	1.412.199.704,00

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD Kulon Progo	Jumlah
	Keterangan	
2006	APARATUR DAERAH	
	Belanja Administrasi Umum	
	Belanja Pegawai/ Personalia	311.894.384,00
	Belanja Barang dan Jasa	81.411.143,00
	Belanja Perjalanan Dinas	30.620.000,00
	Belanja Pemeliharaan	106.373.771,00
	PELAYANAN PUBLIK	
	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	
	Belanja Pegawai/ Personalia	16.355.010,00
	Belanja Barang dan Jasa	223.957.195,00
	Belanja Perjalanan Dinas	25.951.400,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN	796.562.903,00

Tahun	KPPD Gunung Kidul	Jumlah
	Keterangan	
2006	APARATUR DAERAH	
	Belanja Administrasi Umum	
	Belanja Pegawai/ Personalia	272.861.887,00
	Belanja Barang dan Jasa	88.084.405,00
	Belanja Perjalanan Dinas	28.710.000,00
	Belanja Pemeliharaan	114.073.900,00
	PELAYANAN PUBLIK	
	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	
	Belanja Pegawai/ Personalia	12.126.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	230.368.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	27.970.000,00
	Belanja Pemeliharaan	31.600.000,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN	774.194.192,00

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD Sleman	Jumlah
	Keterangan	
2006	APARATUR DAERAH	
	Belanja Administrasi Umum	
	Belanja Pegawai/ Personalia	598.280.837,00
	Belanja Barang dan Jasa	291.653.908,00
	Belanja Perjalanan Dinas	32.180.000,00
	Belanja Pemeliharaan	145.318.696,00
	PELAYANAN PUBLIK	
	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	
	Belanja Pegawai/ Personalia	35.590.500,00
	Belanja Barang dan Jasa	571.611.525,00
	Belanja Perjalanan Dinas	31.530.000,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN	1.706.165.466,00

Sumber: Data primer diolah

Lampiran IV: Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2007

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD DI Kota	
	Keterangan	Jumlah
2007	BELANJA PEGAWAI	
	Gaji dan Tunjangan	
	Gaji Pokok PNS/ Uang Prestasi	439.755.400,00
	Tunjangan Keluarga	36.804.662,00
	Tunjangan Jabatan	48.765.000,00
	Tunjangan Fungsional Umum	44.710.000,00
	Tunjangan Beras	28.936.960,00
	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	7.540.152,00
	Pembulatan Gaji	13.760,00
	BELANJA LANGSUNG	
	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	
	Belanja Peranko, meterai dan benda pos lainnya	1.170.000,00
	Belanja Telepon	3.286.395,00
	Belanja Air	897.250,00
	Belanja Listrik	81.442.925,00
	Belanja Kawat/ faksimili/ internet	0,00
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	
	Honorarium Pengelola Keuangan	24.290.000,00
	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	
	Belanja Jasa Pihak Ketiga	48.096.000,00
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	
	Belanja Alat Tulis Kantor	45.465.900,00
	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	

	Belanja Cetak	13.279.400,00
	Belanja Penggandaan	3.244.600,00
	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK	
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	0,00
	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	415.421,00
	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Belanja Surat Kabar/ Majalah	3.768.000,00
	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	
	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	749.000,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	1.687.500,00
	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	390.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.950.000,00
	PENGADAAN MEUBELAIR	
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	420.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	11.235.000,00
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	95.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	
	Belanja Pengisian tabung Pemadam Kebakaran	871.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	48.450.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor	18.472.500,00
	REHABILITASI SEDANG/ BERAT GEDUNG KANTOR	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	91.800.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00
	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Belanja Publikasi	4.800.000,00
	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI	

	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.140.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	400.000,00
	Belanja Penggandaan	2.122.500,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	1.170.000,00
	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	19.920.000,00
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.434.000,00
	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	35.600.000,00
	Uang Lembur Harian	11.150.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	66.090.350,00
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	104.998.950,00
	Belanja Cetakan	206.884.000,00
	Belanja Penggandaan	6.114.700,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	1.492.500,00
	Belanja makanan dan minuman harian	130.500.000,00
	Belanja makanan dan minuman umum	364.000,00
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.270.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.494.300,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN DI KPPD KOTA	1.692.947.125,00

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD Bantul	
	Keterangan	Jumlah
2007	BELANJA PEGAWAI	
	Gaji dan Tunjangan	
	Gaji Pokok PNS/ Uang Prestasi	419.736.000,00
	Tunjangan Keluarga	40.277.628,00
	Tunjangan Jabatan	39.055.000,00
	Tunjangan Fungsional Umum	37.740.000,00
	Tunjangan Beras	26.859.040,00
	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	8.779.867,00
	Pembulatan Gaji	13.492,00
	BELANJA LANGSUNG	
	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	
	Belanja Perangko, meterai dan benda pos lainnya	600.000,00
	Belanja Telepon	6.430.846,00
	Belanja Air	1.247.250,00
	Belanja Listrik	45.675.480,00
	Belanja Kawat/ faksimili/ internet	9.048.000,00
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	
	Honorarium Pengelola Keuangan	17.815.000,00
	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	
	Belanja Jasa Pihak Ketiga	30.840.000,00
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	
	Belanja Alat Tulis Kantor	11.553.250,00
	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	
	Belanja Cetak	9.270.000,00
	Belanja Penggandaan	996.600,00

	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK	
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.000.000,00
	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Belanja Surat Kabar/ Majalah	2.730.000,00
	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	
	Belanja makanan dan minuman rapat	4.995.000,00
	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.330.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.005.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan	4.820.000,00
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	8.311.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	485.000,00
	Belanja Dokumen/ Administrasi Tender	393.900,00
	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang	980.000,00
	Belanja Penggandaan	680.000,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.730.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR	
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	2.189.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Jasa Service	1.532.000,00
	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.757.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	11.220.000,00
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	94.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	
	Belanja Pengisian tabung Pemadam Kebakaran	1.713.000,00
	Belanja Pemeliharaan Perabot Kantor	4.940.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	29.750.000,00

	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor	7.284.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	13.000.000,00
	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Belanja Publikasi	8.500.000,00
	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	19.380.000,00
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	3.225.500,00
	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	35.600.000,00
	Uang Lembur Harian	6.250.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	47.322.000,00
	Belanja Peranko, Meterai dan benda pos lainnya	44.710.650,00
	Belanja Cetakan	206.355.000,00
	Belanja Penggandaan	1.059.200,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	4.350.000,00
	Belanja makanan dan minuman harian	111.440.000,00
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.850.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.121.200,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN DI KPPD BANTUL	1.370.789.903,00

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD Sleman	Jumlah
	Keterangan	
2007	BELANJA PEGAWAI	
	Gaji dan Tunjangan	
	Gaji Pokok PNS/ Uang Prestasi	558.345.800,00
	Tunjangan Keluarga	57.898.380,00
	Tunjangan Jabatan	53.910.000,00
	Tunjangan Fungsional Umum	54.390.000,00
	Tunjangan Beras	39.865.280,00
	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	10.837.468,00
	Pembulatan Gaji	18.247,00
	BELANJA LANGSUNG	
	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	
	Belanja Perangko, meterai dan benda pos lainnya	1.500.000,00
	Belanja Telepon	12.442.257,00
	Belanja Air	0,00
	Belanja Listrik	51.600.000,00
	Belanja Kawat/ faksimili/ internet	9.000.000,00
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	
	Honorarium Pengelola Keuangan	25.530.000,00
	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	
	Belanja Jasa Pihak Ketiga	37.562.400,00
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	
	Belanja Alat Tulis Kantor	18.450.000,00
	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	
	Belanja Cetak	16.942.300,00
	Belanja Penggandaan	5.655.700,00

	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK	
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.300.000,00
	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Belanja Surat Kabar/ Majalah	3.879.580,00
	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	
	Belanja makanan dan minuman rapat	5.812.500,00
	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.020.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.090.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan	2.329.000,00
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	8.311.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	485.600,00
	Belanja Dokumen/ Administrasi Tender	393.900,00
	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang	1.000.000,00
	Belanja Penggandaan	687.000,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.340.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR	
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.019.000,00
	Belanja bahan Baku Bangunan	78.412.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.264.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	11.840.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	
	Belanja Pengisian tabung Pemadam Kebakaran	1.750.000,00
	Jasa Pemeliharaan Perlangkapan Kantor	3.834.500,00
	Belanja Pemeliharaan Perabot Kantor	5.000.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	46.400.000,00

	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor	10.937.683,00
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	970.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00
	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	800.000,00
	Belanja Penggandaan	3.250.000,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	3.150.000,00
	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16.800.000,00
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	6.939.000,00
	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	35.600.000,00
	Uang Lembur Harian	13.440.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	222.303.500,00
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	63.543.150,00
	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang	2.600.000,00
	Belanja Cetakan	365.685.000,00
	Belanja Penggandaan	8.121.100,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00
	Belanja makanan dan minuman harian	150.179.000,00
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.810.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.848.500,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN DI KPPD SLEMAN	2.177.642.845,00

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD Gunung Kidul	Jumlah
	Keterangan	
2007	BELANJA PEGAWAI	
	Gaji dan Tunjangan	
	Gaji Pokok PNS/ Uang Prestasi	245.071.900,00
	Tunjangan Keluarga	24.417.204,00
	Tunjangan Jabatan	37.440.000,00
	Tunjangan Fungsional Umum	20.470.000,00
	Tunjangan Beras	16.948.960,00
	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	5.189.902,00
	Pembulatan Gaji	8.999,00
	BELANJA LANGSUNG	
	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	
	Belanja Peranko, meterai dan benda pos lainnya	600.000,00
	Belanja Telepon	2.749.311,00
	Belanja Air	836.700,00
	Belanja Listrik	17.615.280,00
	Belanja Kawat/ faksimili/ internet	0,00
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	
	Honorarium Pengelola Keuangan	14.310.000,00
	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	
	Belanja Jasa Pihak Ketiga	41.791.000,00
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	
	Belanja Alat Tulis Kantor	6.785.300,00
	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	
	Belanja Cetak	7.457.600,00
	Belanja Penggandaan	1.333.000,00

	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK	
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2.592.000,00
	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Belanja Surat Kabar/ Majalah	2.592.000,00
	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	
	Belanja makanan dan minuman rapat	0
	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	140.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	49.660.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR	
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.170.000,00
	Belanja bahan Baku Bangunan	15.000.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.675.500,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	9.047.200,00
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	187.000,00
	Belanja Pemeliharaan Perabot Kantor	4.500.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	34.500.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor	5.590.000,00
	REHABILITASI SEDANG/ BERAT GEDUNG KANTOR	
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	7.111.600,00
	REHABILITASI SEDANG/ BERAT GEDUNG KANTOR	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00
	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Belanja Cetak	4.500.000,00
	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.590.000,00
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.803.000,00
	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	35.600.000,00

	Uang Lembur Harian	2.580.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	69.934.250,00
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	27.000.000,00
	Belanja Cetakan	92.100.000,00
	Belanja Penggandaan	2.799.600,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	1.252.500,00
	Belanja makanan dan minuman harian	59.690.000,00
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.660.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.417.000,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN DI KPPD GUNUNG KIDUL	926.716.806,00

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD Kulon Progo	Jumlah
	Keterangan	
2007	BELANJA PEGAWAI	
	Gaji dan Tunjangan	
	Gaji Pokok PNS/ Uang Prestasi	270.707.200,00
	Tunjangan Keluarga	24.719.190,00
	Tunjangan Jabatan	41.940.000,00
	Tunjangan Fungsional Umum	19.175.000,00
	Tunjangan Beras	16.738.800,00
	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	6.223.024,00
	Pembulatan Gaji	7.197,00
	BELANJA LANGSUNG	
	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	
	Belanja Perangko, meterai dan benda pos lainnya	555.000,00
	Belanja Telepon	2.250.467,00
	Belanja Air	2.162.750,00
	Belanja Listrik	23.878.800,00
	Belanja Kawat/ faksimili/ internet	9.048.000,00
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	
	Honorarium Pengelola Keuangan	13.980.000,00
	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	
	Belanja Jasa Pihak Ketiga	27.850.000,00
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	
	Belanja Alat Tulis Kantor	6.744.000,00
	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	
	Belanja Cetak	5.850.000,00
	Belanja Penggandaan	1.519.625,00

	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK	
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1.962.000,00
	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	432.000,00
	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.000.000,00
	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Belanja Surat Kabar/ Majalah	3.110.000,00
	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	
	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.188.000,00
	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	
	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00
	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.260.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.480.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Jasa Service	3.397.700,00
	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.369.099,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	11.555.000,00
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	22.000,00
	Belanja Pemeliharaan Perabot Kantor	2.850.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	34.500.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor	5.590.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00
	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Belanja Cetak	4.960.000,00
	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.720.000,00
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.726.000,00
	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	35.600.000,00

Uang Lembur Harian	5.436.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor	40.136.250,00
Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	35.775.000,00
Belanja Cetakan	90.996.500,00
Belanja Penggandaan	1.111.700,00
Belanja makanan dan minuman rapat	1.927.500,00
Belanja makanan dan minuman harian	65.170.000,00
Belanja makanan dan minuman umum	540.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.466.200,00
TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN DI KPPD KULON PROGO	929.470.002,00

Sumber: Data primer diolah

Lampiran V: Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2008

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD DI Kota	
	Keterangan	Jumlah
2008	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	1.200.000,00
2008	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	
	Belanja Telepon	2.023.018,00
	Belanja Air	372.000,00
2008	Belanja Listrik	28.550.745,00
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIZINAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
2008	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	117.000,00
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	
2008	Honorarium Pengelola Keuangan	30.780.000,00
	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	
2008	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	48.096.000,00
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	
2008	Belanja Alat Tulis Kantor	15.822.400,00
	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	
2008	Belanja Cetakan	12.175.000,00
	Belanja Penggandaan	5.139.370,00
2008	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN KANTOR	
	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery)	6.005.800,00
2008	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.146.270,00
2008	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Belanja Surat Kabar/ Majalah	4.151.500,00

	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	
	Belanja makanan dan minuman rapat	804.000,00
	Belanja makanan dan minuman tamu	3.112.500,00
	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.130.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.450.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	39.350.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.635.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	12.099.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	
	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	2.135.000,00
	Belanja alat-alat kantor	18.913.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum	1.500.000,00
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik	9.825.000,00
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	49.000.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ARSIP SURAT KENDARAAN BERMOTOR	
	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	22.000.000,00
	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Belanja Publikasi	4.980.000,00
	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	25.870.000,00
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00
	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	15.210.000,00
	Uang Lembur PNS	23.470.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	84.085.500,00
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	101.250.000,00
	Belanja Cetakan	327.297.500,00

	Belanja Penggandaan	8.573.655,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	2.295.000,00
	Belanja makanan dan minuman harian	154.800.000,00
	Belanja makanan dan minuman umum	5.842.000,00
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.700.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.025.500,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN DI KPPD KOTA	1.150.431.758,00

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD Bantul	Jumlah
	Keterangan	
2008	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	495.000,00
	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	
	Belanja Telepon	5.880.601,00
	Belanja Air	1.914.500,00
	Belanja Listrik	76.285.065,00
	Belanja kawat/ faksimili/ internet	9.048.000,00
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	343.000,00
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	
	Honorarium Pengelola Keuangan	26.800.000,00
	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	45.331.500,00
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	
	Belanja Alat Tulis Kantor	24.412.750,00
	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	
	Belanja Cetakan	11.640.000,00
	Belanja Penggandaan	1.475.000,00
	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN KANTOR	
	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery)	8.697.200,00
	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Belanja Surat Kabar/ Majalah	3.756.500,00
	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	
	Belanja makanan dan minuman rapat	4.545.000,00
	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	

	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.970.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.990.000,00
	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	
	Honorarium Panitia Pengadaan	3.762.750,00
	Alat tulis kantor	270.000,00
	Belanja Jasa Pengumuman Lelang	3.120.000,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	450.000,00
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	420.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.960.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	24.858.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Jasa Service	2.277.500,00
	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.365.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	22.540.750,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	
	Belanja pengisian tabung gas	1.365.000,00
	Belanja alat-alat kantor	350.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik	8.660.000,00
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	34.000.000,00
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Telepon	300.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ARSIP SURAT KENDARAAN BERMOTOR	
	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	45.000.000,00
	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Belanja Publikasi	5.700.000,00
	Belanja Cetak	4.000.000,00
	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	5.750.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	510.000,00

Belanja Alat-alat perlengkapan	1.875.000,00
Belanja Publikasi	175.000,00
Belanja Penggandaan	300.000,00
Belanja makanan dan minuman harian umum	5.250.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	26.790.000,00
Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1.125.000,00
Honorarium Pegawai Tidak Tetap	7.605.000,00
Uang Lembur PNS	16.606.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor	84.601.000,00
Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	38.136.150,00
Belanja Cetakan	270.890.000,00
Belanja Penggandaan	2.034.900,00
Belanja makanan dan minuman harian pegawai	141.100.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.200.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.936.500,00
TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN DI KPPD BANTUL	1.085.867.666,00

Ringkasan Biaya Pemungutan Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD Sleman	
	Keterangan	Jumlah
2008	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	1.620.000,00
	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	
	Belanja Telepon	6.321.238,00
	Belanja Listrik	57.515.880,00
	Belanja kawat/ faksimili/ internet	9.048.000,00
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	95.000,00
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	
	Honorarium Pengelola Keuangan	35.480.000,00
	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	44.750.500,00
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	
	Belanja Alat Tulis Kantor	27.469.825,00
	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	
	Belanja Cetakan	30.400.000,00
	Belanja Penggandaan	1.150.000,00
	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN KANTOR	
	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery)	10.800.000,00
	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Belanja Surat Kabar/ Majalah	
	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	
	Belanja makanan dan minuman rapat	9.900.000,00
	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.120.000,00

	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.940.000,00
	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	4.586.950,00
	Belanja Jasa Pengumuman Lelang	3.275.870,00
	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	
	Honorarium Panitia Pengadaan	2.097.500,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.065.000,00
	Belanja Bahan Baku Bangunan	77.850.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Jasa Service	4.890.900,00
	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.052.500,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	14.321.500,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	
	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	1.750.000,00
	Belanja alat-alat kantor	5.416.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	26.880,00
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	48.800.000,00
	Belanja pemeliharaan alat kantor	31.320.700,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ARSIP SURAT KENDARAAN BERMOTOR	
	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	40.500.000,00
	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Honorarium Tenaga Berdasarkan Beban Kerja	625.000,00
	Honorarium Harian	1.000.000,00
	Belanja Penggandaan	1.500.000,00
	Belanja Makan dan Minum Tamu	2.275.000,00
	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Honorarium Tenaga Berdasarkan Beban Kerja	7.980.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2.000.000,00

	Belanja Penggandaan	1.495.000,00
	Belanja makanan dan minuman tamu	2.025.000,00
	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.520.000,00
	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	15.210.000,00
	Uang Lembur PNS	34.556.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	350.684.000,00
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	72.511.850,00
	Belanja Jasa Pengumuman Lelang	8.365.752,00
	Belanja Cetak	626.630.000,00
	Belanja Penggandaan	9.200.000,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	6.367.500,00
	Belanja makanan dan minuman harian	190.980.000,00
	Belanja makanan dan minuman umum	4.800.000,00
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.040.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.147.100,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN DI KPPD SLEMAN	1.954.476.445,00

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD Gunung Kidul	Jumlah
	Keterangan	
2008	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	660.000,00
	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	
	Belanja Telepon	2.380.840,00
	Belanja Air	1.823.900,00
	Belanja Listrik	28.521.730,00
	Belanja kawat/ faksimili/ internet	8.294.000,00
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	248.000,00
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	
	Honorarium Pengelola Keuangan	19.725.000,00
	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	45.500.000,00
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	
	Belanja Alat Tulis Kantor	9.365.900,00
	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	
	Belanja Cetakan	5.933.000,00
	Belanja Penggandaan	1.616.000,00
	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN KANTOR	
	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery)	2.273.800,00
	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	
	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	1.050.000,00
	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Belanja Surat Kabar/ Majalah	3.297.500,00
	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	

	Belanja makanan dan minuman rapat	300.000,00
	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.070.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.110.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	38.000.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Jasa Service	5.960.500,00
	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.562.000,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	12.835.700,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	
	Belanja alat-alat kantor	31.783.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ARSIP SURAT KENDARAAN BERMOTOR	
	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	13.200.000,00
	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Belanja Publikasi	3.000.000,00
	Belanja Cetak	1.750.000,00
	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	17.280.000,00
	Uang Lembur PNS	11.726.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	58.544.000,00
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	34.500.000,00
	Belanja Cetakan	100.038.000,00
	Belanja Penggandaan	4.499.000,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00
	Belanja makanan dan minuman harian	88.430.000,00

	Belanja makanan dan minuman umum	3.456.000,00
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.130.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.811.800,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN DI KPPD GUNUNG KIDUL	649.075.670,00

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD Kulon Progo	
	Keterangan	Jumlah
2008	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	600.000,00
	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	
	Belanja Telepon	1.761.387,00
	Belanja Air	2.384.000,00
	Belanja Listrik	25.866.000,00
	Belanja kawat/ faksimili/ internet	9.048.000,00
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	542.000,00
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	
	Honorarium Pengelola Keuangan	17.175.000,00
	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	27.900.000,00
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	
	Belanja Alat Tulis Kantor	14.922.200,00
	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	
	Belanja Cetakan	11.470.000,00
	Belanja Penggandaan	2.931.670,00
	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN KANTOR	
	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery)	260.000,00
	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Belanja Surat Kabar/ Majalah	3.613.000,00
	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	
	Belanja makanan dan minuman rapat	930.000,00
	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	

	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.800.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46.200.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Jasa Service	2.900.500,00
	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.579.600,00
	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	13.901.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	
	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	740.000,00
	Belanja alat-alat kantor	8.085.200,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	63.500.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor	1.095.000,00
	Belanja pemeliharaan jaringan komputer	38.000.000,00
	Belanja pemeliharaan alat kantor	1.725.000,00
	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ARSIP SURAT KENDARAAN BERMOTOR	
	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	10.000.000,00
	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Belanja Publikasi	6.000.000,00
	Belanja Cetak	3.900.000,00
	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	16.920.000,00
	Uang Lembur PNS	9.234.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	42.956.000,00
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	48.246.300,00
	Belanja Cetakan	106.830.000,00
	Belanja Penggandaan	1.562.700,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	300.000,00
	Belanja makanan dan minuman harian	79.150.000,00
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.730.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.046.800,00

	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN DI KPPD KULON PROGO	668.805.357,00
--	---	-----------------------

Sumber: Data primer diolah

Lampiran VI: Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2009

**Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Tahun	KPPD DI Kota	
	Keterangan	Jumlah
2009	GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI	
	Gaji Pokok PNS/ Uang Presentasi	784.395.440,00
	Tunjangan Keluarga	62.153.475,00
	Tunjangan Jabatan	43.380.000,00
	Tunjangan Fungsional Umum	58.215.000,00
	Tunjangan Beras	40.904.100,00
	Tunjangan PPH/ Tunjangan Khusus	16.623.016,00
	Pembulatan Gaji	19.918,00
	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	1.320.000,00
	Belanja Paket/ Pengiriman	31.500,00
	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	
	Belanja Telepon	1.999.069,00
	Belanja Air	
	Belanja Listrik	
	Belanja kawat/ faksimili/ internet	0,00
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	213.000,00
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	
	Honorarium Pengelola Keuangan	32.280.000,00
	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	
	Belanja Jasa Kantor	41.600.000,00
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	

Belanja Alat Tulis Kantor	32.040.000,00
PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	
Belanja Cetakan	27.366.000,00
Belanja Penggandaan	6.250.000,00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN KANTOR	
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery)	3.552.000,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Belanja Surat Kabar/ Majalah	3.747.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	
Belanja makanan dan minuman harian	1.152.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat	3.528.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.250.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	46.270.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR	
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.310.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
Belanja Jasa Service	0,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	6.625.500,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	14.551.350,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	986.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum	1.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik	49.730.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	480.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga	6.950.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ARSIP SURAT KENDARAAN BERMOTOR	
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	24.200.000,00
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	

Belanja Publikasi	5.000.000,00
INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	26.810.000,00
Honorarium Pegawai Tidak Tetap	14.700.000,00
Uang Lembur PNS	23.614.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor	101.526.250,00
Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	112.499.500,00
Belanja Jasa Pengumuman Lelang	1.599.750,00
Belanja Cetak	55.911.420,00
Belanja Penggandaan	8.562.500,00
Belanja makanan dan minuman harian pegawai	156.290.000,00
Belanja makanan dan minuman umum	3.272.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat	4.952.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.880.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.791.100,00
TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN DI KPPD KOTA	1.857.030.888,00

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD Bantul	
	Keterangan	Jumlah
2009	GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI	
	Gaji Pokok PNS/ Uang Presentasi	745.603.803,00
	Tunjangan Keluarga	79.158.349,00
	Tunjangan Jabatan	37.458.156,00
	Tunjangan Fungsional Umum	54.325.000,00
	Tunjangan Beras	42.638.400,00
	Tunjangan PPH/ Tunjangan Khusus	17.360.612,00
	Pembulatan Gaji	16.117,00
	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	750.000,00
	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	
	Belanja Telepon	6.932.688,00
	Belanja Air	
	Belanja Listrik	
	Belanja kawat/ faksimili/ internet	9.048.000,00
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	356.000,00
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	
	Honorarium Pengelola Keuangan	28.280.000,00
	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	
	Belanja Jasa Kantor	46.683.600,00
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	
	Belanja Alat Tulis Kantor	30.655.400,00
	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	
	Belanja Cetakan	15.366.000,00

Belanja Penggandaan	1.375.000,00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN KANTOR	
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery)	9.345.500,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Belanja Surat Kabar/ Majalah	3.864.500,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	
Belanja makanan dan minuman rapat	7.872.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.460.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.100.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR	
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	18.552.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
Belanja Jasa Service	3.267.500,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	4.034.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	23.192.500,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	1.371.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	18.420.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat kantor	29.525.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ARSIP SURAT KENDARAAN BERMOTOR	
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	50.000.000,00
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Honorarium Tenaga Ahli	900.000,00
Belanja Publikasi	2.350.000,00
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	7.200.000,00
Belanja Alat-alat/Peralatan	3.304.000,00

Belanja Dokumentasi	170.000,00
Belanja Spanduk	200.000,00
Belanja Cetak	0,00
Belanja Penggandaan	255.625,00
Belanja makanan dan minuman rapat	128.000,00
Belanja makanan dan minuman umum	8.400.000,00
INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	29.100.000,00
Honorarium Pegawai Tidak Tetap	9.100.000,00
Uang Lembur PNS	9.072.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor	57.255.000,00
Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	47.310.750,00
Belanja Jasa Pengumuman Lelang	1.481.250,00
Belanja Cetak	28.100.000,00
Belanja Penggandaan	2.523.750,00
Belanja makanan dan minuman harian pegawai	137.000.000,00
Belanja makanan dan minuman umum	2.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.800.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.643.800,00
TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN DI KPPD BANTUL	1.703.705.300,00

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD Sleman	
	Keterangan	Jumlah
2009	GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI	
	Gaji Pokok PNS/ Uang Presentasi	973.768.300,00
	Tunjangan Keluarga	90.365.384,00
	Tunjangan Jabatan	41.760.000,00
	Tunjangan Fungsional Umum	78.975.000,00
	Tunjangan Beras	51.732.900,00
	Tunjangan PPH/ Tunjangan Khusus	21.459.663,00
	Pembulatan Gaji	25.402,00
	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	1.800.000,00
	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	
	Belanja Telepon	8.092.919,00
	Belanja Air	
	Belanja Listrik	
	Belanja kawat/ faksimili/ internet	9.048.000,00
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	117.000,00
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	
	Honorarium Pengelola Keuangan	36.180.000,00
	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	11.595.500,00
	Belanja Bahan/ Material	10.000.000,00
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	
	Belanja Alat Tulis Kantor	35.486.350,00
	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	

Belanja Cetak	40.820.000,00
Belanja Penggandaan	1.150.000,00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN KANTOR	
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery)	13.860.000,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Belanja Surat Kabar/ Majalah	6.318.500,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	
Belanja makanan dan minuman rapat	9.562.500,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.100.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.030.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR	
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	12.225.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
Belanja Jasa Service	2.900.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	4.175.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	16.771.500,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	3.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	8.570.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	49.300.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin	63.249.500,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ARSIP SURAT KENDARAAN BERMOTOR	
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	52.000.000,00
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Honorarium Penyelenggara Kegiatan	625.000,00
Honorarium Harian	1.000.000,00
Belanja Cetak	1.500.000,00
Belanj Makan dan Minuman Tamu	2.275.000,00

	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	7.980.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli	2.000.000,00
	Belanja Cetak	3.000.000,00
	Belanja Penggandaan	577.500,00
	Belanja makanan dan minuman umum	2.880.000,00
	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.520.000,00
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	3.190.000,00
	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	18.200.000,00
	Uang Lembur PNS	34.560.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	22.685.500,00
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	110.997.900,00
	Belanja Jasa Pengumuman Lelang	1.540.500,00
	Belanja Lain-lain Jasa Kantor	31.800.000,00
	Belanja Cetak	35.559.820,00
	Belanja Penggandaan	12.610.000,00
	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	191.893.000,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	6.375.000,00
	Belanja makanan dan minuman umum	4.800.000,00
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.990.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.906.000,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN DI KPPD SLEMAN	2.272.903.638,00

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD Gunung Kidul	
	Keterangan	Jumlah
2009	GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI	
	Gaji Pokok PNS/ Uang Presentasi	455.989.830,00
	Tunjangan Keluarga	54.126.555,00
	Tunjangan Jabatan	37.440.000,00
	Tunjangan Fungsional Umum	32.025.000,00
	Tunjangan Beras	28.256.400,00
	Tunjangan PPH/ Tunjangan Khusus	10.171.740,00
	Pembulatan Gaji	13.379,00
	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	660.000,00
	Belanja Paket/ Pengiriman	19.000,00
	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	
	Belanja Telepon	2.589.308,00
	Belanja Air	
	Belanja Listrik	
	Belanja kawat/ faksimili/ internet	9.048.000,00
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	178.000,00
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	
	Honorarium Pengelola Keuangan	22.480.000,00
	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	39.000.000,00
	Belanja Jasa Kantor	
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	
	Belanja Alat Tulis Kantor	10.499.100,00
	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	

Belanja Cetakan	5.951.000,00
Belanja Penggandaan	1.888.000,00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN KANTOR	
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery)	3.114.500,00
PENYEDIAAN ALAT RUMAH TANGGA	
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.100.000,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Belanja Surat Kabar/ Majalah	3.420.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	
Belanja makanan dan minuman rapat	2.376.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.040.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.090.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR	
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
Belanja Jasa Service	5.864.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	2.617.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	12.585.500,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	
Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik	39.503.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	13.480.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat kantor	3.900.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ARSIP SURAT KENDARAAN BERMOTOR	
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	13.200.000,00
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Belanja Publikasi	6.000.000,00
Belanja Cetak	1.750.000,00

	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	17.760.000,00
	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	472.000,00
	Uang Lembur PNS	14.738.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	21.160.400,00
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	0,00
	Belanja Cetak	7.118.000,00
	Belanja Penggandaan	5.736.000,00
	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	92.060.000,00
	Belanja makanan dan minuman rapat	3.616.000,00
	Belanja makanan dan minuman umum	3.456.000,00
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.180.000,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.873.800,00
	TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN DI KPPD GUNUNG KIDUL	1.047.545.512,00

Ringkasan Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	KPPD Kulon Progo	
	Keterangan	Jumlah
2009	GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI	
	Gaji Pokok PNS/ Uang Presentasi	436.405.380,00
	Tunjangan Keluarga	48.225.542,00
	Tunjangan Jabatan	44.820.000,00
	Tunjangan Fungsional Umum	27.690.000,00
	Tunjangan Beras	26.226.000,00
	Tunjangan PPH/ Tunjangan Khusus	10.297.702,00
	Pembulatan Gaji	8.779,00
	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	
	Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	645.000,00
	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	
	Belanja Telepon	1.954.616,00
	Belanja Air	
	Belanja Listrik	
	Belanja kawat/ faksimili/ internet	9.048.000,00
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	102.000,00
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	
	Honorarium Pengelola Keuangan	18.430.000,00
	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	
	Belanja Jasa Kantor	18.600.000,00
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	
	Belanja Alat Tulis Kantor	15.586.600,00
	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	
	Belanja Cetakan	7.706.000,00

Belanja Penggandaan	444.950,00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN KANTOR	
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery)	1.457.750,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Belanja Surat Kabar/ Majalah	3.688.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	
Belanja makanan dan minuman rapat	1.248.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.570.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.910.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG KANTOR	
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL	
Belanja Jasa Service	5.812.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	2.380.500,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas	14.872.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	680.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	
Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik	49.450.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	8.246.500,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	
Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	224.120,00
Belanja Pemeliharaan Alat kantor	4.327.500,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA ARSIP SURAT KENDARAAN BERMOTOR	
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	9.907.000,00
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Belanja Publikasi	8.300.000,00
Belanja Cetak	3.996.000,00
INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.520.000,00
Uang Lembur PNS	11.654.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor	23.838.900,00
Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya	48.710.050,00
Belanja Cetak	8.400.000,00
Belanja Penggandaan	1.042.895,00
Belanja makanan dan minuman harian pegawai	83.310.000,00
Belanja makanan dan minuman rapat	320.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.400.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.902.800,00
TOTAL BIAYA PEMUNGUTAN DI KPPD KULON PROGO	1.026.358.584,00

Sumber: Data primer diolah

Lampiran VII: Persentase Pajak Daerah di Tiap KPPD

**PERSENTASE PAJAK DAERAH DI TIAP KPPD
PROVINSI DI YOGYAKARTA TAHUN 2005 S.D. 2009**

URAIAN	TAHUN 2005		TAHUN 2006		TAHUN 2007	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
	(Rupiah)	(%)	(Rupiah)	(%)	(Rupiah)	(%)
Pajak Kendaraan Bermotor	149.291.828.905,00	41,46	171.146.972.390,00	45,69	199.659.041.270,00	45,91
Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor	154.710.634.950,00	42,96	115.544.048.150,00	30,85	142.987.677.700,00	32,88
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	53.914.945.004,00	14,97	85.805.843.818,00	22,91	89.940.087.066,00	20,68
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT-AP	2.202.254.895,00	0,61	2.081.660.030,00	0,55	2.312.088.105,00	0,53
TOTAL	360.119.663.754,00	100	374.578.524.388,00	100,00	434.898.894.141,00	100,00

URAIAN	TAHUN 2008		TAHUN 2009	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
	(Rupiah)	(%)	(Rupiah)	(%)
Pajak Kendaraan Bermotor	222.136.390.300,00	42,30	252.833.382.945,00	46,72
Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor	190.932.195.150,00	36,36	181.956.963.100,00	33,62
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	109.829.732.718,35	20,91	104.090.628.453,00	19,23
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT-AP	2.287.036.025,00	0,44	2.311.291.271,60	0,43
TOTAL	525.185.354.193,35	100,00	541.192.265.769,60	100,00

Lampiran VIII: Rekapitulasi dan Penentuan Besar Biaya Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Rekapitulasi Pembelanjaan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Provinsi DIY					
Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD)	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
KPPD KOTA	1.186.008.925	1.416.002.338	1.692.947.125	1.150.431.758	1.857.030.888
KPPD BANTUL	987.651.743	1.412.199.704	1.370.789.903	1.085.867.666	1.703.705.300
KPPD SLEMAN	1.278.552.728	1.706.165.466	2.177.642.845	1.954.476.445	2.272.903.638
KPPD GUNUNG KIDUL	567.156.277	774.194.192	926.716.806	649.075.670	1.047.545.512
KPPD KULON PROGO	590.447.321	796.562.903	929.470.002	668.805.357	1.026.358.584
Total Biaya Pemungutan Pajak Daerah di seluruh KPPD Prov. DIY	4.609.816.994	6.105.124.603	7.097.566.681	5.508.656.896	7.907.543.922

Sumber: Data primer diolah

PENENTUAN BESAR BIAYA PEMUNGUTAN			
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PROV. DIY			
Tahun	Jumlah Biaya Pemungutan	Persentase PKB	Biaya Pemungutan
	Pajak Daerah (dalam Rupiah)	(%)	PKB (dalam Rupiah)
	(a)	(b)	(a) x (b)
2005	4.609.816.994,00	41,46	1.911.230.126,00
2006	6.105.124.603,00	45,69	2.789.431.431,00
2007	7.097.566.681,00	45,91	3.258.492.863,00
2008	5.508.656.896,00	42,30	2.330.161.867,00
2009	7.907.543.922,00	46,72	3.694.404.520,00

Sumber: Data primer diolah

Lampiran IX: Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2005 - 2009

KODE REK	URAIAN	TARGET 2005	REALISASI 2005	NAIK/TURUN	%	TARGET 2006	REALISASI 2006
4	PENDAPATAN	665.366.027.225,40	699.579.306.215,18	34.213.278.989,78	5,14	811.602.007.151,72	881.160.029.573,62
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	373.889.939.911,36	401.912.337.894,18	28.022.397.982,82	7,49	368.522.643.044,43	436.497.274.575,62
4 1 1	Pajak Daerah	338.866.932.998,36	360.119.663.754,00	21.252.730.755,64	6,27	327.375.549.000,00	374.578.524.388,00
4 1 1 01	Pajak Kendaraan Bermotor	130.059.012.000,00	149.291.828.905,00	19.232.816.905,00	14,79	138.123.360.000,00	171.146.972.390,00
4 1 1 03	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	164.757.718.700,00	154.710.634.950,00	-10.047.083.750,00	-6,10	103.867.319.000,00	115.544.048.150,00
4 1 1 05	Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor	41.850.202.298,36	53.914.945.004,00	12.064.742.705,64	28,83	83.678.870.000,00	85.805.843.818,00
4 1 1 06	Pajak Pengambilan dan Pemanfatan ABT- AP	2.200.000.000,00	2.202.254.895,00	2.254.895,00	0,10	1.706.000.000,00	2.081.660.030,00
4 1 2	Retribusi Daerah	10.020.178.208,00	11.940.416.429,00	1.920.238.221,00	19,16	11.745.727.282,00	12.454.919.866,00
4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum						
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha						
4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu						
4 1 3	Hasil Perusahaan Milik Daerah	12.358.409.005,00	11.859.586.426,07	-498.822.578,93	-4,04	12.299.634.962,43	11.217.078.313,10
4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	12.644.419.700,00	17.992.671.285,11	5.348.251.585,11	42,30	17.101.731.800,00	38.246.752.008,52
4 2	DANA PERIMBANGAN	271.047.087.314,04	277.237.968.321,00	6.190.881.006,96	2,28	441.562.452.507,29	442.882.531.848,00
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.429.000.000,00	20.429.000.000,00	0,00	0,00	1.516.911.600,00	1.780.223.150,00

NAIK/TURUN	%	TARGET 2007	REALISASI 2007	NAIK/TURUN	%	TARGET 2008	REALISASI 2008	NAIK/TURUN	%
69.558.022.421,90	8,57	911.558.526.278,00	967.870.747.519,50	56.312.221.241,50	6,18	1.161.986.630.223,42	1.258.609.946.423,39	96.623.316.199,97	8,32
67.974.631.531,19	18,45	420.568.426.068,00	480.181.759.199,50	59.613.333.131,50	14,17	547.887.175.315,00	632.872.311.670,13	84.985.136.355,13	15,51
47.202.975.388,00	14,42	378.916.438.850,00	434.898.894.141,00	55.982.455.291,00	14,77	486.168.175.841,00	525.185.354.193,35	39.017.178.352,35	8,03
33.023.612.390,00	23,91	171.324.990.700,00	199.659.041.270,00	28.334.050.570,00	16,54	208.414.628.000,00	222.136.390.300,00	13.721.762.300,00	6,58
11.676.729.150,00	11,24	115.544.692.150,00	142.987.677.700,00	27.442.985.550,00	23,75	169.530.376.000,00	190.932.195.150,00	21.401.819.150,00	12,62
2.126.973.818,00	2,54	90.046.756.000,00	89.940.087.066,00	-106.668.934,00	-0,12	106.023.171.841,00	109.829.732.718,35	3.806.560.877,35	3,59
375.660.030,00	22,02	2.000.000.000,00	2.312.088.105,00	312.088.105,00	15,60	2.200.000.000,00	2.287.036.025,00	87.036.025,00	3,96
709.192.584,00	6,04	14.722.357.478,00	17.563.425.637,00	2.841.068.159,00	19,30	33.144.872.640,00	29.259.898.291,50	-3.884.974.348,50	-11,72
						22.033.176.240,00	17.870.392.661,50	-4.162.783.578,50	-18,89
						8.354.149.900,00	8.577.471.580,00	223.321.680,00	2,67
						2.757.546.500,00	2.812.034.050,00	54.487.550,00	1,98
-1.082.556.649,33	-8,80	12.371.829.740,00	11.927.611.593,02	-444.218.146,98	-3,59	12.768.526.834,00	12.481.050.738,67	-287.476.095,33	-2,25
21.145.020.208,52	123,64	14.557.800.000,00	15.791.827.828,48	1.234.027.828,48	8,48	15.805.600.000,00	65.946.008.446,61	50.140.408.446,61	317,23
1.320.079.340,71	0,30	488.667.515.010,00	480.922.834.904,00	-7.744.680.106,00	-1,58	590.574.676.643,42	602.117.047.488,00	11.542.370.844,58	1,95
263.311.550,00	17,36	2.322.585.200,00	6.766.153.416,00	4.443.568.216,00	191,32	23.524.778.265,00	23.620.587.265,26	95.809.000,26	0,41

TARGET 2009	REALISASI 2009	NAIK/TURUN	%
1.211.298.252.646,00	1.287.308.842.581,57	76.010.589.935,57	6,28
573.593.852.631,00	646.384.918.488,57	72.791.065.857,57	12,69
494.847.565.500,00	546.778.513.889,00	51.930.948.389,00	10,49
232.505.419.000,00	258.279.758.795,00	25.774.339.795,00	11,09
159.698.700.000,00	181.956.118.600,00	22.257.418.600,00	13,94
100.253.869.000,00	104.088.917.953,00	3.835.048.953,00	3,83
2.389.577.500,00	2.453.718.541,00	64.141.041,00	2,68
32.669.306.905,00	34.744.291.180,57	2.074.984.275,57	6,35
21.450.194.435,00	22.615.585.393,57	1.165.390.958,57	5,43
8.495.774.470,00	9.623.648.147,00	1.127.873.677,00	13,28
2.723.338.000,00	2.505.057.640,00	-218.280.360,00	-8,02
19.736.868.047,00	20.094.713.175,00	357.845.128,00	1,81
26.340.112.179,00	44.767.400.244,00	18.427.288.065,00	69,96
630.650.143.805,00	631.013.111.383,00	362.967.578,00	0,06
7.054.256.210,00	9.910.812.710,00	2.856.556.500,00	40,49